

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena perannya yang begitu besar maka keberadaan kendaraan bermotor merupakan keniscayaan bagi masyarakat.

Jumlah kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2000 jumlah kendaraan bermotor berbagai jenis di Indonesia masih kurang dari 19 juta, pada tahun 2013 jumlahnya sudah meningkat menjadi di atas 104 juta.

Tabel.1.1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya (2000-2013)

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2000	3.038.913	666 280	1 707 134	13 563 017	18 975 344
2001	3 189 319	680 550	1 777 293	15 275 073	20 922 235
2002	3 403 433	714 222	1 865 398	17 002 130	22 985 183
2003	3 792 510	798 079	2 047 022	19 976 376	26 613 987
2004	4 231 901	933 251	2 315 781	23 061 021	30 541 954
2005	5 076 230	1 110 255	2 875 116	28 531 831	37 623 432
2006	6 035 291	1 350 047	3 398 956	32 528 758	43 313 052
2007	6 877 229	1 736 087	4 234 236	41 955 128	54 802 680
2008	7 489 852	2 059 187	4 452 343	47 683 681	61 685 063
2009	7 910 407	2 160 973	4 498 171	52 767 093	67 336 644
2010	8 891 041	2 250 109	4 687 789	61 078 188	76 907 127
2011	9 548 866	2 254 406	4 958 738	68 839 341	85 601 351
2012	10 432 259	2 273 821	5 286 061	76 381 183	94 373 324
2013	11 484 514	2 286 309	5 615 494	84 732 652	104 118 969

Sumber: Kantor Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh BPS, GAIKINDO dan AISI

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, perkembangan jumlah kendaraan bermotor terbanyak terjadi pada sepeda motor dan mobil penumpang. Sedangkan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang walaupun persentasenya hampir sama dengan sepeda motor dan mobil penumpang, namun jumlahnya masih relatif sedikit, yaitu hanya 7.901.803 atau sekitar 0,07% dari total kendaraan. Bandingkan dengan jenis kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang yang jumlahnya mencapai 96.217.166 atau sekitar 92,41%.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut, baik roda dua, roda empat atau lebih, berdampak pada kondisi lalu lintas jalan raya. Kondisi jalan akan lebih padat, jika tidak disertai dengan ketertiban pengemudi dalam berlalulintas maka akan berakibat pada ketidaktertiban lalu lintas yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut data pada Korlantas Polri, selama tahun 2014 jumlah angka kecelakaan di Indonesia mencapai 95.906 kasus, dengan jumlah korban tewas sebanyak 28.297 orang. Adapun kerugian material karena kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 250.110.380.000,-. Jumlah angka kecelakaan tersebut pada tahun 2015 meningkat menjadi 98.970.765 kasus, dengan jumlah korban tewas sebanyak 26.495 orang. Adapun kerugian material karena kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 272.314.014.600. Banyaknya kasus kecelakaan dan jumlah korban tersebut sangat memprihatinkan, walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2013 jumlahnya menurun, yaitu sekitar 100.106 kasus. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011, sebagaimana yang dirilis oleh Ditjend Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sekitar 72% dari kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor.¹ Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, maka oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), kematian akibat kecelakaan lalu lintas dinilai sebagai pembunuh terbesar ketiga di Indonesia, di bawah penyakit jantung koroner dan tuberkulosis.²

¹ <http://www.gatra.com/hukum-1/44540-pada-2013,-23-385-tewas-kecelakaan-lalu-lintas.html>

² (<http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-intas-pembunuh-terbesar-ketiga#sthas.OfxghGMj.dpuf>)

Ada tiga faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut, menurut hasil penelitian Treat dkk sebagaimana dikutip oleh Najid,³ faktor kesalahan manusia menempati urutan tertinggi, yaitu sekitar 82,6%, kemudian faktor kendaraan 14,8%, dan faktor jalan serta lingkungan 2,6%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka fokus utama pencegahan kecelakaan lalu lintas adalah mengubah perilaku mengemudi.

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi timbulnya kecelakaan lalu lintas, karena SIM hanya diberikan kepada orang yang sudah memiliki keterampilan mengemudi. Dengan memiliki SIM, diharapkan pengemudi kendaraan bermotor dapat menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan keamanan lalu lintas adalah terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan lalu lintas adalah terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan, yang antara lain berupa terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dikemukakan adanya tiga fungsi yang terdapat pada SIM, yaitu: (1) bukti kompetensi mengemudi, (2) registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, dan (3) data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Pentingnya SIM sebagai bukti kompetensi mengemudi itu juga dinyatakan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, khususnya di dalam Pasal 1 Ayat (4). Selain itu SIM juga sebagai tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi masyarakat yang telah lulus uji

³<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3770/S14.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Mengingat pentingnya SIM tersebut, maka di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22/2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan SIM juga ikut meningkat.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi wewenang untuk menerbitkan SIM, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 5 Ayat (3) Huruf e undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan pembinaan lalu lintas terkait dengan urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

SIM hanya diberikan apabila calon pengemudi sudah memiliki kompetensi mengemudi, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Untuk itu pemohon SIM harus mengikuti serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, ada dua jenis ujian yang harus ditempuh oleh pemohon untuk memperoleh SIM, yaitu ujian teori dan ujian praktik. Di dalam Pasal 1 Ayat (13) disebutkan bahwa ujian teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar ranmor, cara mengemudikan ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji sebagaimana tercantum dalam Ayat (14). Adapun ujian praktik adalah penilaian

terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji (Pasal 1 ayat (14)).

Untuk menguji kompetensi pemohon SIM baik secara teori maupun praktik tersebut, Polri perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengetahui kondisi dan efektivitas sarana prasarana yang ada itulah maka perlu dilakukan penelitian. Sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi Pasal 19 ayat (1) sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian teori sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator.
- b. Nomor peserta Ujian.
- c. Buku registrasi
- d. Perangkat komputer untuk ujian (AVIS).
- e. Proyektor dan layar.
- f. Headset.
- g. Server data.
- h. Printer hasil ujian.
- i. Perangkat ujian lain.

Di dalam Pasal 19 Ayat (2) juga disebutkan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian teori, yaitu meliputi:

- a. Ruang ujian teori.
- b. Ruang tunggu ujian teori dan/atau.
- c. Tenda portabel untuk pelayanan unit SIM komunitas.

Di dalam Pasal 20 Ayat (1) Perkap yang sama juga disebutkan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian praktek, yaitu meliputi:

- a. Kendaraan bermotor (Ranmor) untuk ujian.
- b. Peralatan simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan SIM A dan SIM D yang setara dengan SIM C.
- c. Helm.
- d. Nomor peserta ujian.
- e. Buku register.
- f. Komputer entri data.

- g. Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktek elektronik.
- h. Papan nilai digital.
- i. Pengeras suara.
- j. Peluit.
- k. Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji.
- l. Kerucut lalu lintas (*traffic cone*) uji yang dilengkapi dengan peralatan sensor.
- m. Rambu lalu lintas dan marka jalan dan
- n. Jembatan atau tanjakan portabel yang dilengkapi peralatan sensor.

Adapun di dalam Ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan ujian praktek meliputi:

- a. Lapangan ujian praktik dengan ketentuan lebar dan panjang lapangan ujian praktik disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) dan/atau dimensi ranmor yang akan digunakan, serta materi ujian pada setiap golongan.
- b. Ruang tunggu ujian praktik, dan
- c. Perangkat ujian praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem penilaian secara elektronik atau sistem penilaian secara manual.

Di Pasal 17 Ayat (1) Perkap tersebut juga dinyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap petugas penguji SIM, yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan;
- c. Disiplin dan bertanggung jawab;
- d. Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- e. Menguasai bidang tugas yang akan diujikan;
- f. Telah memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- g. Dapat mengoperasikan komputer.

Selain memenuhi persyaratan tersebut, di dalam Pasal 17 Ayat (2) juga disebutkan persyaratan lainnya, yaitu petugas penguji SIM wajib memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Kemampuan administrasi, yang meliputi:
 - 1) Manajerial di bidang pengujian SIM;
 - 2) Pengarsipan; dan
 - 3) Produk-produk tertulis;

- b. Pengetahuan, yang meliputi:
 - 1) Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Teknik Ranmor.
 - 3) Teknik mengemudi, dan
 - 4) Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

- c. Keterampilan, yang meliputi:
 - 1) Mengoperasikan sarana dan prasarana uji.
 - 2) Mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji.
 - 3) Mengoperasikan teknik Ranmor dan
 - 4) Berlalu lintas dengan benar di jalan.

- d. Kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi:
 - 1) Mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji.
 - 2) Mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uji. dan
 - 3) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian.

Khusus kemampuan mengajar dan melatih, di dalam Pasal 17 Ayat (3) disebutkan bahwa harus dibuktikan dengan sertifikat lulus pendidikan dan latihan penguji SIM, yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri. Adapun di dalam Ayat (4) disebutkan bahwa hanya petugas yang memenuhi persyaratan yang dapat diangkat sebagai penguji SIM dengan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

2. Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini mencakup sarana prasara uji SIM baik teori maupun praktik di Satuan Pelayanan SIM (Satpas) di satuan kewilayahan. Untuk menguji kompetensi pemohon SIM baik secara teori maupun praktik, Polri perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai baik untuk uji

teori maupun praktik. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan efektivitas sarana prasarana tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Berkaitan dengan hal itu, beberapa permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi sarana prasarana uji SIM yang dimiliki pada fungsi lalu lintas (Lantas) di satuan kewilayahan ?
- b. Bagaimana efektivitas sarana prasarana uji SIM dalam mendukung pelayanan penerbitan SIM ?
- c. Bagaimana standar kompetensi personel (penguji) dan operator pelayanan penerbitan SIM?

3. Tujuan

- a. Menganalisis kondisi sarana prasarana uji SIM pada fungsi lalu lintas yang telah tergelar di satuan kewilayahan.
- b. Menganalisis efektivitas sarana prasarana pelayanan penerbitan SIM.
- c. Menganalisis kompetensi personel (penguji) dan operator pelayanan penerbitan SIM.

4. Manfaat

- a. Dengan diketahui kondisi sarana prasarana uji SIM pada fungsi lalu lintas yang telah tergelar di satuan kewilayahan, maka dapat dirumuskan kebutuhan sarana prasarana yang tepat dan ideal;
- b. Dengan diketahui efektivitas sarana prasarana pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), maka dapat di susun prioritas pengadaan peralatan/sarana yang dibutuhkan;
- c. Dengan diketahui kompetensi personel (penguji) dan operator pelayanan penerbitan SIM, maka dapat disusun standar kompetensi yang dibutuhkan.

5. Sistematika

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian tentang “Efektivitas Sarana Prasarana Uji SIM Kendaraan Bermotor guna Mewujudkan Pelayanan Prima”, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu: teori efektivitas, teori kelayakan, teori sarana prasarana, dan teori layanan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisa data, dan wilayah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kondisi sarana prasarana pelayanan uji SIM, baik untuk ujian teori maupun praktik, efektivitas sarana dan prasarana uji SIM, serta kompetensi petugas penguji SIM.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian, dan saran kebijakan kepada pimpinan Polri.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Efektivitas Sarana dan Prasarana

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan. Kendaraan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, yang digunakan untuk pengangkutan orang, barang atau sebagai alat transportasi. Walaupun per definisi sebetulnya kereta api termasuk sebagai kendaraan bermotor, namun di dalam undang-undang tersebut kereta api dikecualikan, karena tidak termasuk sebagai obyek yang diatur di dalam undang-undang tersebut, dan sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Di dalam kehidupan sosial kendaraan itu memiliki fungsi penting, yaitu sebagai sarana mobilitas sosial. Dengan menggunakan kendaraan, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain menjadi lebih efisien, sehingga proses interaksi sosial juga dapat berjalan lebih lancar. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan jenis dan jumlah kendaraan, maka akan terjadi perubahan pola berlalu lintas yang berakibat pada terjadinya perubahan interaksi sosial. Dengan demikian baik secara langsung atau tidak langsung perubahan kendaraan (baik pada jenis atau jumlah kendaraan) akan berpengaruh terhadap perubahan sosial, yang terwujud dalam perubahan perilaku masyarakat.

Agar perubahan sosial bisa terarah menjadi lebih baik, maka kehidupan sosial dibimbing oleh norma-norma, yaitu seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalam perilaku berlalu lintas disebut sebagai etika berlalu lintas. Etika berlalu lintas itulah yang kemudian diperkuat melalui norma hukum, yang wajib dipatuhi oleh semua orang yang menggunakan sarana kendaraan untuk berlalu lintas. Di sinilah peran negara diperlukan di dalam pengaturan berlalu lintas.

Paling tidak ada dua peran yang dilakukan oleh negara dalam mengatur lalu lintas agar berjalan tertib, dalam arti keadaan berlalu lintas dapat berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, yaitu pengaturan *input* dan pengaturan *output*. Pengaturan *input* adalah aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaktertiban lalu lintas. Termasuk dalam pengaturan *input* antara lain adalah pembatasan jumlah kendaraan bermotor, dan larangan melewati jalan tertentu pada jam-jam tertentu (seperti pemberlakuan nomor ganjil genap yang boleh melewati jalan Sudirman – Thamrin pada jam-jam tertentu). Adapun pengaturan *output* terkait dengan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

Kewajiban kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor, sesuai dengan jenis motor yang dikendarai merupakan bagian dari pengaturan *input*. Kewajiban tersebut mengandung pesan bahwa setiap orang hanya boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya jika sudah memiliki kompetensi (pengetahuan dan kemampuan yang memadai) untuk mengemudikan kendaraan bermotor, agar keamanan dan ketertiban lalu lintas dapat terjamin. Oleh karena itu proses kepemilikan SIM harus dilakukan melalui ujian, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah orang itu sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan memiliki kemampuan yang memadai tentang cara mengemudikan kendaraan di jalan raya. Di sinilah peran Polri sebagai lembaga penegak hukum yang diberi wewenang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan permohonan untuk memperoleh SIM sangat diperlukan, melalui uji teori maupun uji praktik permohonan SIM.

Agar pelayanan yang diberikan bisa optimal, maka untuk keperluan uji SIM (baik teori maupun praktik) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, dalam arti mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien. Terkait dengan itu, Poerwadarminto (1996) mendefinisikan sarana sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan, sedangkan prasarana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, maka sarana ditujukan untuk menyebut benda-benda yang dapat digerakkan seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana ditujukan untuk menyebut benda-benda yang tidak dapat digerakkan seperti gedung.

Pelayanan efektif adalah pelayanan yang ukuran keberhasilannya diukur dari berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik. Adapun efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output* pelayanan, yang secara ideal pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa, dan pada sisi *output* pelayanan, birokrasi harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas (Dwiyanto dkk, 2008).

Dalam konteks pelayanan SIM, oleh karena pelayanan efektif itu dapat terjadi jika didukung oleh sarana dan prasarana yang efektif, maka efektivitas sarana dan prasarana itu dapat diukur dari sejauhmana dukungannya terhadap keberhasilan pencapaian organisasi dalam memberikan layanan publik. Adapun efisiensi sarana dan prasarana dapat diukur dari sejauhmana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung input pelayanan yang dilakukan oleh organisasi seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa, dan dapat mendukung *output* pelayanan organisasi berupa produk layanan yang berkualitas (Monoarfa, 2012).

Efisiensi *output* pelayanan antara lain dapat dilihat pada pemberian produk layanan yang tanpa disertai tindakan pemaksaan kepada masyarakat untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti pungutan di luar ketentuan dalam proses pelayanan, atau yang dalam kultur pelayanan birokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah "*tahu sama tahu*". Istilah ini merujuk pada

pengertian adanya toleransi dari pihak aparat birokrasi maupun masyarakat pengguna jasa untuk menggunakan mekanisme suap dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam konteks pelayanan SIM, itu dapat terwujud dalam bentuk pelayanan pemberian SIM tanpa melalui prosedur yang baku, seperti pemberian suap kepada petugas pelayanan.

Praktik seperti itu dapat terjadi dan bisa dipahami dengan melihat pada teori pertukaran (*exchange theory*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Hommans. Menurut Hommans (1950), masyarakat cenderung untuk memilih perilaku yang dianggapnya paling rasional, yaitu yang mendatangkan ganjaran (*reward*), dan menjauhi perilaku yang mendatangkan hukuman (*punishment*). Dalam proposisinya yang disebut proposisi sukses, Homans menyatakan bahwa jika seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka akan cenderung mengulangi tindakannya. Begitu pula dalam proposisi stimulus, disebutkan bahwa jika di masa lalu seperangkat stimuli mengantarkan orang untuk memperoleh ganjaran, maka di masa datang orang akan melakukan tindakan yang sama agar dapat memperoleh ganjaran serupa. Adapun dalam proposisi nilai disebutkan bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka orang akan semakin senang melakukan tindakan itu.

Menurut Siagian (2001), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Abdurahmat (2003) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Adapun Hidayat (1996) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dalam hal ini efektivitas tidak terkait dengan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pelayanan Prima

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapun pelayanan prima (*service excellent*) harfiah berarti pelayanan yang terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan (Swastika, 2005).

Definisi pelayanan prima tersebut mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu.

Dalam memberikan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan prima yang di jelaskan oleh beberapa penulis. Barata (2004) menyebutkan ada enam unsur pokok dalam pelayanan prima, yaitu:

- a. Kemampuan (*ability*);
- b. Sikap (*attitude*);
- c. Penampilan (*appearance*);
- d. Perhatian (*attention*);
- e. Tindakan (*action*);
- f. Tanggung jawab (*responsibility*).

Adapun Tjiptono (2002) menyebutkan bahwa pelayanan prima terdiri dari empat unsur pokok, yaitu.

- a. Kecepatan;
- b. Ketepatan;
- c. Keramahan;
- d. Kenyamanan.

Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan atau konsumen agar lebih maksimal dan berhasil. Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima, yang ingin diterapkan pada para pelanggan atau konsumen.

Pelayanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. Pelayanan adalah aspek yang tidak bisa disepelekan dalam persaingan bisnis, karena dengan pelayanan yang baik konsumen akan menilai kemudian menimbang apakah selanjutnya akan loyal kepada pemberi layanan tersebut. Oleh karena itu tidak jarang para pebisnis memaksimalkan layanannya untuk menarik konsumen sebesar-besarnya. Adapun pelayanan secara umum dapat diartikan sebagai menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh orang lain (Purwadarminta, 1996). Tjiptono mendefinisikan layanan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli produknya. Sedangkan Barata (2004) menyatakan bahwa suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Ada beberapa ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, yaitu:

- a. Memiliki karyawan yang profesional khususnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik serta dapat menunjang kelancaran produk ke pelanggan secara cepat dan tepat.
- c. Tersedianya ragam produk yang diinginkan.
- d. Bertanggung jawab pada setiap pelanggan dari awal hingga selesai.
- e. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan pihak pesaing.

- f. Mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
- g. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama dalam hal keuangan.
- h. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang dijual dan pengetahuan umum lainnya.
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan berbagai sarana dan prasarana uji SIM serta efektivitasnya secara detil. Pendeskripsian tersebut tidak berdasarkan pandangan perseorangan, tetapi yang diperlukan adalah kelengkapan dari deskripsi. Oleh karena itu data yang diperlukan adalah data yang berupa narasi. Melalui pendekatan ini fakta-fakta yang ditemukan akan ditelusuri dan dieksplorasi secara mendalam, dengan tetap berpegang pada kaidah yang sistematis dan argumentatif sesuai kerangka pemikiran yang ada. Walaupun penelitian ini bersifat kualitatif, namun data kuantitatif tetap diperlukan, untuk mendukung penjelasan data yang bersifat kualitatif. Data kuantitatif juga diperlukan terutama untuk mengetahui pengakuan masyarakat terkait dengan penggunaan peralatan dalam memproses permohonan SIM.

2. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer yang bersifat kualitatif dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*).
- b. Observasi.

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sarana dan prasarana yang tersedia, serta untuk mengetahui penggunaan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan SIM. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kompetensi petugas yang melayani penerbitan SIM. Adapun observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi peralatan dan prasarana yang ada, serta melihat praktik penerbitan SIM. Sesuai dengan permasalahan penelitian, sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kapolda/Wakapolda/Dir Lantas;
- b. Kabag Regident;

- c. Kasubbag SIM;
- d. Kapolres/Wakapolres/Kasat Lantas;
- e. Paur SIM;
- f. Penguji SIM;
- g. Operator dan Pengelola Sarpras Uji SIM;
- h. Klinik Pengemudi;
- i. Sekolah mengemudi;
- j. Masyarakat pemohon SIM.

Data sekunder yang diperlukan adalah dokumen yang berkaitan dengan jumlah pemohon SIM, dan dokumen tentang sarana dan prasarana penerbitan SIM yang tersedia. Data sekunder tersebut diperoleh dari Satpas – Satpas yang diteliti.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, yang berisi poin-poin yang ditanyakan di dalam wawancara. Poin-poin itulah yang dikembangkan oleh peneliti dalam wawancara langsung dengan pimpinan Satwil, para penguji dan operator di lapangan. Di dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan tidak bersifat kaku, tetapi berkembang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara analisis deskripti, cara mengelompokkan lebih dulu data yang terkumpul ke dalam kategori yang sama, dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Data yang berbentuk narasi tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di 9 (sembilan) Polda dan jajaran, yaitu: Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Jambi, Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan Polda Kalimantan Tengah. Adapun Polres jajaran di setiap Polda yang dijadikan lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1
Polda Dan Polres Jajaran Yang Menjadi Lokasi Penelitian

No	Polda	Polrestabes /Polresta / Polres
1	Metro Jaya	1. Satpas Daan Mogot 2. Satpas Polresta Bekasi 3. Satpas Polres Bekasi Kota 4. Satpas Polres Depok 5. Satpas Polres Tangerang Kota
2	Kepulauan Riau	1. Satpas Polresta Bareleng 2. Satpas Polres Tanjung Pinang 3. Satpas Polres Bintan 4. Satpas Polres Tanjung Balai Karimun
3	Sumatera Barat	1. Satpas Polresta Padang 2. Satpas Polres Padang Panjang 3. Satpas Polres Tanah datar 4. Satpas Polres Payakumbuh 5. Satpas Polres Bukit Tinggi
4	Sulawesi Tenggara	1. Satpas Polres Kendari 2. Satpas Polres Konawe 3. Satpas Polres Kolaka 4. Satpas Polres Bombana 5. Satpas Polres Konawe Selatan
5	Jambi	1. Satpas Polresta Jambi 2. Satpas Polres Muaro Jambi 3. Satpas Polres Batanghari 4. Satpas Polres Bungo 5. Satpas Polres Merangin

No	Polda	Polrestabes /Polresta / Polres
6	Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpas Polresta Denpasar 2. Satpas Polres Tabanan 3. Satpas Polres Badung 4. Satpas Polres Buleleng 5. Satpas Polres Gianyar 6. Satpas Polres Klungkung
7	Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpas Polresta Bandung 2. Satpas Polres Purwakarta 3. Satpas Polres Subang 4. Satpas Polres Cimahi 5. Satpas Polres Karawang 6. Satpas Polres Bogor Kota 7. Satpas Polres Bogor kabupaten
8	Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpas Polrestabes Semarang 2. Satpas Polres Kudus 3. Satpas Polres Demak 4. Satpas Polresta Semarang 5. Satpas Polres Salatiga 6. Satpas Polres Boyolali 7. Satpas Polres Klaten 8. Satpas Polres Sragen 9. Satpas Polres Surakarta
9	Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpas Polres Palangkaraya 2. Satpas Polres Pulang Pisau 3. Satpas Polres Kapuas 4. Satpas Polres Katingan 5. Satpas Polres Kotawaringin Timur 6. Satpas Polres Kotawaringin Barat

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Kelengkapan Sarana Uji Teori

Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM, dalam pasal 19 Ayat (1) disebutkan bahwa sarana uji teori sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Meja dan kursi peserta ujian serta meja dan kursi pengawas/operator;
- b. Nomor peserta ujian;
- c. Buku register;
- d. Perangkat komputer untuk ujian (*avis*);
- e. Proyektor dan layar;
- f. Headset;
- g. Server data;
- h. Printer hasil ujian;
- i. Perangkat ujian lainnya.

Kelengkapan sarana yang disebutkan dalam Perkap tersebut merupakan kelengkapan sarana yang ideal, yaitu sarana yang harus tersedia di setiap Satpas, untuk mendukung pelaksanaan ujian teori. Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap Satpas, juga hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pada umumnya sarana yang tersedia untuk ujian teori masih cukup lengkap, walaupun masih ada beberapa sarana yang belum tersedia. Meskipun demikian, beberapa sarana yang tersedia belum digunakan secara optimal, atau bahkan tidak diperlukan. Uraian berikut menjelaskan kelengkapan sarana untuk ujian teori di setiap Polda.

a. Polda Metro Jaya

Jumlah pemohon SIM baru di setiap Satpas yang diteliti sekitar 300 - 500 orang per hari. Sarana ujian teori yang tersedia di Satpas Polda Metro Jaya cukup lengkap kecuali *headset* dan *proyektor*, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Sarana Uji Teori Polda Metro Jaya

No	Nama Sarana Uji Teori	Daan Mogot	Bekasi Kabupaten	Bekasi Kota	Depok Kota	Tangerang Kota
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja peserta ujian	94	25	24	17	20
2	Kursi peserta ujian	94	25	24	17	20
3	Meja pengawas/operator	3	28	2	2	2
4	Kursi pengawas/operator	3	28	2	2	2
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian	94	25	24	17	24
8	Proyektor dan layar	1	-	1	-	-
9	Headset	-	-	-	-	-
10	Server data	2	1	-	-	-
11	Printer hasil ujian	3	2	2	1	2
12	Sistem Ujian Teori	Online dan manual	Online dan manual	Online dan manual	Online dan manual	Online

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Adapun *headset* memang tidak diperlukan baik untuk ujian secara *online* atau pun secara manual, dan hanya diperlukan untuk ujian yang menggunakan sistem *Audio Visual Integrated System (AVIS)*.

Di setiap Satpas ujian teori dilakukan secara manual dan *online*, karena banyak pemohon yang belum terbiasa mengoperasikan komputer, kecuali di Polresta Tangerang. Di Polres ini ujian teori sama sekali tidak dilakukan secara manual.

Di Satpas Daan Mogot, terdapat permasalahan jaringan internet untuk ujian secara *online*, yaitu sering *down* akibat jumlah lalu lintas data yang tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia, yang disebabkan oleh keberadaan server data yang terpusat di Korlantas Polri. Kondisi tersebut

mengakibatkan peserta ujian *online* harus mengulang dari awal karena gangguan teknis jaringan, bahkan ada yang berpindah ke manual sistem.

b. Polda Jawa Barat

Jumlah pemohon SIM baru di setiap Satpas yang diteliti sekitar 100 -200 orang per hari. Sarana ujian teori yang tersedia cukup lengkap, kecuali *headset*. Sarana komputer untuk ujian teori antara 25-30 unit, kecuali di Satpas Polres Karawang yang jumlahnya sebanyak 87 unit. Jumlah komputer yang digunakan untuk memasukkan data, menyimpan foto, sidik jari, serta untuk mencetak kartu SIM juga sudah memadai. Masing-masing Satpas juga sudah memiliki minimal satu server lokal.

Tabel 4.2.
Sarana Uji Teori Polda Jawa Barat

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Bandung	Cimahi	Purwakarta	Subang	Karawang	Bogor Kota	Bogor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja peserta ujian	25	18	20	25	87	24	100
2	Kursi peserta ujian	25	18	20	25	87	20	100
3	Meja pengawas/ operator	1	3	3	1	6	1	4
4	Kursi pengawas/ operator	2	3	2	1	6	1	4
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian (avis)	25	18	20	25	87	24	30
8	Proyektor dan layar	-	1	1	1	4	1	4
9	Headset	-	-	20	-	-	-	-
10	Server data	1	1	1	1	4	2	4
11	Printer hasil ujian	1	2	1	1	4	1	4
12	Sistem Ujian Teori	Online	AVIS	Manual	AVIS	AVIS	Manual	AVIS

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Adapun *headset* memang tidak

diperlukan baik untuk ujian secara *online* atau pun secara manual, dan hanya diperlukan untuk ujian yang menggunakan sistem AVIS.

Di Polres Bandung ujian teori hanya dilakukan secara *online*. Ujian teori secara manual dilakukan di Satpas Polres Purwakarta dan Bogor Kota. Adapun di Satpas Polres Cimahi, Subang, Karawang dan Bogor kabupaten ujian teori dilakukan menggunakan AVIS. Sarana ujian teori yang tersedia umumnya cukup baik.

c. Polda Jawa Tengah

Jumlah pemohon SIM di setiap Satpas yang diteliti antara 50-150 orang per hari. Pelaksanaan ujian teori diatur secara bergelombang, setiap gelombang berkisar 20-40 orang. Umumnya ujian teori dilakukan menggunakan AVIS yang soal-soalnya ditampilkan di layar proyektor. Ujian teori secara *online* hanya dilaksanakan di Satpas Polresta Semarang. Sarana ujian teori yang tersedia umumnya cukup lengkap kecuali di beberapa Satpas tidak tersedia *headset* dan *proyektor*.

Tabel 4.3.
Sarana Uji Teori Polda Jawa Tengah

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Semarang	Kudus	Demak	Semarang	Salatiga	Boyolali	Klaten	Sragen	Surakarta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meja peserta ujian	20	20	17	16	5	20	40	20	25
2	kursi peserta ujian	20	20	17	16	5	20	40	20	25
3	Meja pengawas/ operator	1	2	1	1	1	2	1	1	2
4	Kursi pengawas/ operator	1	2	1	1	1	1	1	1	2
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian (avis)	25	1	1	1	20	1	7	1	1
8	Proyektor dan layar	-	1	1	1	-	1	-	1	1
9	Headset	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Server data	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Semarang	Kudus	Demak	Semarang	Salatiga	Boyolali	Klaten	Sragen	Surakarta
11	Printer hasil ujian	2	2	1	2	1	-	1	2	1
12.	Sistem Ujian Teori	<i>Online</i>	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik, kecuali di Polresta Surakarta, yaitu beberapa meja dan kursi ujian rusak berat. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat.

Di Satpas Polresta Semarang ujian teori hanya dilakukan secara *online*, tetapi di Satpas lainnya menggunakan sistem AVIS. *Headset* tidak tersedia di semua Satpas, termasuk di Satpas yang ujian teorinya menggunakan system AVIS.

d. Polda Bali

Jumlah pemohon SIM baru di Satpas Polda Bali sekitar 100 orang per hari. Ujian teori umumnya menggunakan AVIS. Ujian teori secara *online* hanya dilakukan di Polresta Denpasar. Setiap Satpas sudah memiliki server lokal. Sarana untuk ujian teori sudah cukup lengkap kecuali proyektor, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Sarana Ujian Teori Polda Bali

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Denpasar	Tabanan	Badung	Buleleng	Bangli	Gianyar	Klungkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja peserta ujian	13	16	3	4	5	6	3
2	kursi peserta ujian	13	16	5	4	5	5	4
3	Meja pengawas/operator	2	1	1	1	1	1	4
4	Kursi pengawas/operator	2	1	1	1	1	1	1
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian	22	9	5	5	5	5	4
8	Proyektor dan layar	-	1	-	-	-	-	-
9	Headset	13	16	5	5	5	5	4

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Denpasar	Tabanan	Badung	Buleleng	Bangli	Gianyar	Klungkung
10	Server data	1	1	1	1	1	1	1
11	Printer hasil ujian	1	1	1	1	1	1	1
12	Sistem Ujian Teori	Online	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS	AVIS

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik, kecuali di Satpas Polres Tabanan, yaitu beberapa komputer dan *headset* dalam kondisi rusak. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Ujian teori secara *online* hanya dilakukan di Satpas Polresta Denpasar, dan tidak melaksanakan ujian secara manual. Di Satpas yang lain ujian teori dilaksanakan menggunakan AVIS.

e. Polda Sumatera Barat

Jumlah pemohon SIM di Satpas yang diteliti antara 30-100 orang per hari. Di semua Satpas ujian teori SIM dilakukan secara manual, yaitu menggunakan lembaran soal ujian untuk diisi oleh pemohon, kecuali di Polresta Padang. Di Satpas ini ujian teori hanya dilakukan secara *online*. Sarana ujian teori di setiap Satpas belum lengkap sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5. Masing-masing Satpas sudah memiliki server lokal, dan aplikasi untuk administrasi SIM (pendataan, pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan, dan pencetakan kartu SIM), yang berasal dari Korlantas Polri.

Tabel 4.5.
Sarana Uji Teori Polda Sumatera Barat

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Padang	Padang Panjang	Tanah Datar	Paya Kumbuh	Bukit Tinggi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja peserta ujian	20	8	11	10	10
2	Kursi peserta ujian	20	8	11	10	10
3	Meja pengawas/operator	3	1	1	1	2
4	Kursi pengawas/operator	3	2	1	2	2
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Padang	Padang Panjang	Tanah Datar	Paya Kumbuh	Bukit Tinggi
7	Perangkat komputer untuk ujian	20	-	-	-	-
8	Proyektor dan layar	1	-	-	-	-
9	Headset	-	-	-	-	-
10	Server data	1	1	1	1	-
11	Printer hasil ujian	-	-	-	-	-
12	Sistem Ujian Teori	Online	Manual	Manual	Manual	Manual

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Selain itu, *headset* juga tidak diperlukan karena ujian dilakukan secara manual.

f. Polda Kepulauan Riau

Pemohon ujian SIM di Satpas yang diteliti antara 20-30 orang per hari, kecuali di Polresta Bareleng yang jumlahnya sekitar 80 orang per hari. Ujian teori di semua Polres masih dilakukan secara manual kecuali di Polresta Bareleng. Di Satpas ini ujian teori hanya dilakukan secara *online*. Sarana ujian teori di Polda ini termasuk lengkap, kecuali *headset* yang tidak tersedia di semua Satpas. Setiap Satpas umumnya memiliki server lokal. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi uji SIM berasal dari Korlantas Polri.

Tabel 4.6.
Sarana Ujian Teori Polda Kepulauan Riau

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Bareleng	Tanjung Pinang	Bintan	Tanjung Balai Karimun
1	2	3	4	5	6
1	Meja peserta ujian	18	12	12	10
2	Kursi peserta ujian	18	12	12	10
3	Meja pengawas/operator	2	2	1	1
4	Kursi pengawas/operator	2	2	1	1
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian (avis)	18	1	1	1

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Bareleng	Tanjung Pinang	Bintan	Tanjung Balai Karimun
8	Proyektor dan layar	1	1	1	1
9	Headset	-	-	-	-
10	Server data	2	-	1	1
11	Printer hasil ujian	2	1	1	-
12	Sistem Ujian Teori	Online	Manual	Manual	Manual

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik, kecuali di Satpas Tanjung Balai Karimun, yaitu terdapat AVIS dan layar proyektor yang rusak berat. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Selain itu, *headset* juga tidak diperlukan karena ujian dilakukan secara manual.

g. Polda Jambi

Jumlah pemohon SIM di Satpas Polda Jambi antara 10-20 orang per hari, kecuali di Polresta Jambi yang jumlahnya lebih banyak, yaitu rata-rata sekitar 50 orang per hari. Sarana ujian teori masih kurang lengkap seperti yang terlihat dalam tabel 4.7. Ujian SIM umumnya dilakukan secara manual, kecuali di Polresta Jambi yang ujiannya hanya dilakukan secara *online*. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi uji SIM di setiap Satpas berasal dari Korlantas Polri.

Tabel 4.7.
Sarana Uji Teori Polda Jambi

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Jambi	Muaro Jambi	Batanghari	Bungo	Merangin
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja peserta ujian	20	9	7	8	4
2	Kursi peserta ujian	20	5	14	10	9
3	Meja pengawas/operator	2	1	1	1	-
4	Kursi pengawas/operator	4	1	2	2	-
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian (avis)	20	1	-	-	-
8	Proyektor dan layar	-	1	-	-	-

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Jambi	Muaro Jambi	Batanghari	Bungo	Merangin
9	Headset	-	-	-	-	-
10	Server data	-	-	-	-	-
11	Printer hasil ujian	1	-	-	-	-
12	Sistem Ujian Teori	Online	Manual	Manual	Manual	Manual

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik kecuali di Satpas Muaro Jambi, yaitu ada 1 meja ujian yang rusak berat. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Selain itu, *headset* juga tidak diperlukan karena ujian dilakukan secara manual.

h. Polda Kalimantan Tengah

Jumlah pemohon SIM di Satpas yang diteliti antara 10 – 15 orang per hari, kecuali di Polresta Palangkaraya jumlahnya lebih banyak, yaitu antara 50-70 orang per hari. Di semua Satpas ujian teori sudah dilakukan secara *online* yang terhubung dengan Korlantas Polri. Administrasi ujian SIM juga sudah memanfaatkan aplikasi berbasis web yang ada di Korlantas Polri. Sarana ujian teori juga sudah lengkap, kecuali proyektor yang umumnya tidak ada. Adapun printer hasil ujian dan *headset* sudah ada di setiap Satpas, kecuali di Polres Palangkaraya.

Tabel 4.8.
Sarana Uji Teori Polda Kalimantan Tengah

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Palangkaraya	Pulang Pisau	Kapuas	Katingan	Kotim	Kobar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meja peserta ujian	20	5	5	5	5	5
2	Kursi peserta ujian	20	5	5	5	5	5
3	Meja pengawas/operator	1	1	1	1	1	1
4	Kursi pengawas/operator	1	1	1	1	1	1
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian	20	5	5	5	5	5

No	Nama Sarana Uji Teori	Polresta Palangkaraya	Pulang Pisau	Kapuas	Katingan	Kotim	Kobar
8	Proyektor dan layar	-	1	-	-	-	-
9	Headset	-	16	5	5	5	5
10	Server data	1	1	1	1	1	1
11	Printer hasil ujian	-	1	1	1	1	1
12	Sistem Ujian Teori	Online	Online	Online	Online	Online	Online

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik, kecuali di Polres Kapuas. Di Satpas ini terdapat 1 komputer untuk ujian *online* yang rusak berat. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Selain itu, *headset* juga tidak diperlukan karena ujian dilakukan secara *online*.

i. Polda Sulawesi Tenggara

Jumlah pemohon SIM di Satpas yang diteliti sekitar 30-40 orang per hari, kecuali di Kowane Selatan yang rata-rata hanya 5 orang per hari. Ujian teori dilakukan dengan menggunakan AVIS, kecuali di Polres Kendari. Di Polres ini ujian teori hanya dilakukan secara *online*. Administrasi uji SIM di hampir semua Satpas menggunakan aplikasi yang berasal dari Korlantas Polri. Di beberapa Satpas sarana ujian teori yang tersedia sudah lengkap, namun di beberapa Polres lainnya masih belum lengkap.

Satu hal yang unik dari pelayanan ujian SIM di wilayah ini dilakukan oleh Polres Bombana, yaitu peserta yang sudah dinyatakan lulus kartu SIM-nya diberikan di dalam amplop yang baik dan menarik. Selain itu, untuk melayani masyarakat di kepulauan, pelaksanaan ujian SIM tidak dilakukan di Satpas, tetapi juga dilakukan di sekitar desa terdekat.

Tabel 4.9.
Sarana Ujian Teori Polda Sulawesi Tenggara

No	Nama Sarana Uji Teori	Kendari	Konawe	Kolaka	Bombana	Konawe Selatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja peserta ujian	20	11	12	4	4
2	Kursi peserta ujian	20	11	12	4	20
3	Meja pengawas/ operator	2	3	2	1	1
4	Kursi pengawas/ operator	2	3	2	3	1
5	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perangkat komputer untuk ujian	20	2	1	-	1
8	Proyektor dan layar	-	1	-	-	1
9	Headset	-	-	-	-	-
10	Server data	-	1	1	1	1
11	Printer hasil ujian	2	2	1	1	1
12	Sistem Ujian Teori	Online	AVIS	AVIS	Manual	AVIS

Semua peralatan untuk ujian teori tersebut dalam kondisi baik, kecuali di Satpas Polres Kolaka. Di Satpas ini terdapat 1 perangkat AVIS yang rusak berat. Hasil wawancara diketahui bahwa proyektor tidak diperlukan di semua Satpas, karena penjelasan kepada peserta ujian SIM diberikan secara lisan, dengan pertimbangan bisa lebih cepat. Selain itu, di beberapa Satpas *headset* memang tidak diperlukan karena ujian dilakukan secara manual atau *online*.

2. Kelengkapan Sarana Uji Praktik

Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM, dalam pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa sarana uji praktik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Ranmor untuk ujian.
- b. Peralatan Simulator (Ranmor R2 dan R4)
- c. Helm.
- d. Nomor peserta ujian.
- e. Buku register.
- f. Komputer entri data.
- g. Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik.

- h. Papan nilai (digital dan non digital)
- i. Pengeras suara.
- j. Peluit.
- k. Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji.
- l. Kerucut lalu lintas (traffic cone) uji (dilengkapi sensor dan tidak dilengkapi sensor)
- m. Rambu lalu lintas.
- n. Marka jalan.
- o. Jembatan atau tanjakan portabel (dilengkapi sensor dan tanpa sensor)

Kelengkapan tersebut merupakan kelengkapan sarana untuk ujian praktik yang ideal, yang harus tersedia di setiap Satpas. Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap Satpas, juga hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pada umumnya sarana untuk ujian praktik yang tersedia di setiap Polda masih belum lengkap. Uraian berikut menjelaskan kelengkapan sarana uji praktik di setiap Polda dan jajarannya.

a. Polda Metro Jaya

Sarana uji praktik di Satpas yang diteliti masih belum lengkap, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.10. Kendaraan untuk uji praktik tersedia di setiap Satpas, baik kendaraan R2 maupun R4, namun umumnya hanya bertransmisi manual. Di beberapa Satpas juga sudah tersedia simulator R2 maupun R4. Meskipun demikian di beberapa Satpas lainnya belum tersedia. Walaupun di semua Satpas sudah ada kerucut lalulintas, namun belum ada yang dilengkapi sensor.

Tabel 4.10.
Sarana Uji Praktik Polda Metro Jaya

No	Nama Sarana Uji Praktik	DaanMogot	Bekasi Kabupaten	BekasiKota	Depok	Tangerang Kota
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranmor untuk ujian					
	a. Ranmor R2	59	5	6	2	6
	b. Ranmor R4	5	1	1	1	1
2	Peralatan Simulator:					
	a. Ranmor R2	19*	5*	-	-	-
	b. Ranmor R4	3	2	-	-	-

No	Nama Sarana Uji Praktik	DaanMogot	Bekasi Kabupaten	BekasiKota	Depok	Tangerang Kota
	c. Ranmor R>4	8	-	-	-	-
3	Helm	30	2	4	2	5
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	5	2	1	2	2
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	2	-	-	2
8	Papan nilai:					
	a. Digital	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	2	-	-	-	1
10	Peluit	-	4	-	-	-
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	-	18	50	11	-
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-	-
14	Marka jalan	-	-	-	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	1	-	-	-	-

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

Semua peralatan untuk ujian praktik tersebut dalam kondisi baik, kecuali simulator R-2 yang ada di Satpas Daan Mogot dan Polres Bekasi Kabupaten. Di Satpas Daan Mogot juga terdapat 1 helm yang rusak berat. Papan nilai digital tidak tersedia di setiap Satpas, karena tidak dibutuhkan. Kerucut uji tersedia di setiap Satpas, namun tidak ada yang dilengkapi sensor. Tanjakan uji umumnya juga tidak tersedia di setiap Satpas, karena lahannya sempit. Tanjakan uji hanya tersedia di Satpas Daan Mogot, namun tidak dilengkapi sensor.

b. Polda Jawa Barat

Sarana uji praktik di Satpas yang diteliti belum lengkap, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.11. Kendaraan R-2 dan R-4 untuk uji praktik sudah tersedia di setiap Satpas, namun umumnya hanya kendaraan yang menggunakan transmisi manual. Simulator kendaraan R-2 tersedia di

setiap Satpas, tapi hampir semuanya dalam kondisi rusak kecuali di Polresta Bandung. Selain itu, tidak semua Satpas memiliki tanjakan untuk uji praktik dan papan nilai, baik digital maupun non digital. Kerucut uji tersedia di setiap Satpas, namun tidak ada yang dilengkapi sensor. Tanjakan uji umumnya juga tidak tersedia di setiap Satpas, karena lahannya sempit. Tanjakan uji yang tersedia juga tidak dilengkapi sensor.

Tabel 4.11.
Sarana Uji Praktik Polda Jawa Barat

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polrestabes Bandung	Cimahi	Purwa Karta	Subang	Karawang	Bogor Kota	Bogor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ranmor untuk ujian							
	a. Ranmor R2	14	5	2	2	2	2	4
	b. Ranmor R4	3	1	1	1	1	2	1
2	Peralatan Simulator:							
	a. Ranmor R2	2	5*	5*	5*	5*	6*	4*
	b. Ranmor R4	-	5	5	5	6	3*	5
	c. Ranmor R>4	-	1*	-	1*	1*	1*	1^
3	Helm	4	4	2	2	2	2	4
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	2	2	1	-	1	1	1
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	-	-	-	-	-	-
8	Papan nilai:							
	a. Digital	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non digital	1	-	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	1	1	-	-	1	1	-
10	Peluit	2	4	2	2	1	1	2
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	2	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :							
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	25	10	25	15	7	54	53
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-	-	-	-
14	Marka jalan	-	-	-	-	-	2	2
15	Jembatan atau tanjakan :							
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	-	1	1	1	-	1	1

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

c. Polda Jawa Tengah

Sarana uji praktik di Satpas yang diteliti belum lengkap, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.12. Kendaraan R2 dan R4 untuk uji praktik sudah tersedia di setiap Satpas, kecuali di Satpas Klaten yang belum tersedia kendaraan R4. Kendaraan untuk uji praktik tersebut umumnya hanya menggunakan transmisi manual.

Tabel 4.12.
Sarana Uji Praktik Polda Jawa Tengah

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polresta Semarang	Kudus	De-mak	Sema-rang	Sala-tiga	Boyolali	Klaten	Sragen	Sura-karta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ranmor untuk ujian									
	a. Ranmor R2	18	2	2	2	1	2	2	1	3
	b. Ranmor R4	3	1	2	1	1	1	-	1	2
2	Peralatan Simulator:									
	a. Ranmor R2	-	3*	4*	3*	4*	3*	3*	3*	2*
	b. Ranmor R4	-	1*	4*	1*	2*	2*	3*	1*	2*
	c. Ranmor R>4	1	1	1	1	1+	1	1	1+	1+
3	Helm	18	2	2	2	2	2	2	2	3
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	-	-	-	-	-	3	-	-	-
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	-	1	-	2	-	-	-	-
8	Papan nilai:									
	a. Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	-	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Peluit	9	2	2	2	2	2	2	2	3
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	3	2	2	-	2	-	-	2	1
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :									
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	60	70	60	50	70	60	100	50	60
13	Rambu lalu lintas	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Marka jalan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :									
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	1	1	-	-	1	1	1	1	1

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

Simulator untuk R-2 dan R-4 tersedia di hamper setiap Satpas, tapi hampir semuanya dalam kondisi rusak. Selain simulator, semua peralatan dalam keadaan baik. Beberapa Satpas sudah memiliki tanjakan untuk uji praktik, namun belum dilengkapi sensor. Begitu pula kerucut lalu lintas yang tersedia di setiap Satpas.

d. Polda Bali

Sarana uji praktik yang tersedia di Satpas yang diteliti umumnya masih kurang lengkap. Kendaraan uji praktik tersedia di semua Satpas, bahkan kendaraan R-2 pada umumnya lebih dari satu. Meskipun demikian kendaraan R-4 umumnya hanya satu unit, kecuali di Satpas Polresta Denpasar. Semua kendaraan tersebut belum ada yang menggunakan transmisi otomatis.

Tabel 4.13.
Sarana Uji Praktik Polda Bali

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polrestabes Denpasar	Tabanan	Badung	Buleleng	Bangli	Gianyar	Klungkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ranmor untuk ujian :							
	a. Ranmor R2	6	3	3	1	1	1	2
	b. Ranmor R4	4	1	2	1	1	1	1
2	Peralatan Simulator :							
	a. Ranmor R2	3*	3*	1*	-	1*	2*	-
	b. Ranmor R4	2*	3*	1*	-	1*	1*	-
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-	-	-	-
3	Helm	4	3	3	2	2	-	10
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	2	-	-	1	1	2	-
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	1	-	-	-	-	-
8	Papan nilai:							
	a. Digital	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non digital	1	-	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	1	-	1	1	-	1	-
10	Peluit	3	3	2	3	1	1	2
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	1	-	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :							
	a. Dilengkapi sensor		-	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	25	33	10	23	31	18	50
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-	1	-	-

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polrestabes Denpasar	Tabanan	Badung	Buleleng	Bangli	Gianyar	Klungkung
14	Marka jalan	6	8	4	4	-	-	-
15	Jembatan atau tanjakan portable yang dilengkapi peralatan sensor							
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	1	1	1	2	1	-	-

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa simulator untuk R2 dan R4 tersedia di hampir semua Satpas, tapi semuanya dalam kondisi rusak. Selain simulator, semua peralatan dalam keadaan baik. Beberapa Satpas sudah memiliki tanjakan untuk uji praktik, namun tidak menggunakan sensor. Papan nilai digital umumnya tidak tersedia di setiap Satpas.

Di beberapa Satpas tidak tersedia kerucut lalu lintas atau tersedia namun kurang, sehingga diganti dengan patok dari pralon yang diisi besi. Meskipun demikian ukuran pralon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 09/2012, yaitu tinggi 40 Cm dan diameter 15 Cm. Selain itu, jarak antara satu patok dengan patok lain juga tidak selalu mengikuti standard yang ditentukan dalam Perkap Nomor 09 Tahun 2012. Di beberapa Satpas jarak pemasangan antar patok lebih sempit dari yang seharusnya, sehingga mempersulit pemohon untuk dapat lulus.

e. Polda Sumatera Barat

Sarana uji praktik yang tersedia di Satpas yang diteliti masih kurang lengkap. Semua Satpas sudah menyediakan kendaraan R-2 maupun R-4 untuk uji praktik, namun masih menggunakan transmisi manual. Jumlah kendaraan R-2 dan R-4 di setiap Satpas masing-masing satu unit, kecuali di Polresta Padang.

Tabel 4.14.
Sarana Uji Praktik Polda Sumatera Barat

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polresta Padang	Padang Panjang	Tanah Datar	Payakumbuh	Bukit Tinggi
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranmor untuk ujian :					
	a. Ranmor R2	6	1	1	1	1
	b. Ranmor R4	2	1	1	1	1
2	Peralatan Simulator:					
	a. Ranmor R2	3*	-	1*	1*	2*
	b. Ranmor R4	-	-	1*	1*	2*
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-	-
3	Helm	6	-	2	2	-
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	2	1	1	1	2
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	1	-	-	-	-
8	Papan nilai :					
	a. Digital	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	1	-	-	1	-
10	Peluit	-	-	2	-	-
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	30	60	30	40	50
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-	-
14	Marka jalan	-	-	-	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	-	-	-	-	-

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa simulator untuk R-2 dan R-4 tersedia di beberapa Satpas, tapi hampir semuanya dalam kondisi rusak. Selain simulator, semua peralatan dalam keadaan baik. Semua Satpas belum memiliki tanjakan untuk uji praktik. Kerucut lalu lintas yang tersedia di setiap Satpas tidak dilengkapi sensor, dan di beberapa Satpas jumlahnya kurang sehingga diganti dengan patok. Oleh karena jumlah patok sebagai pengganti kerucut lalu lintas di setiap satpas umumnya juga kurang, maka penggunaannya dilakukan dengan cara bongkar pasang disesuaikan dengan materi uji praktik.

f. Polda Kepulauan Riau

Sarana uji praktik yang tersedia di Satpas yang diteliti masih kurang lengkap. Semua Satpas sudah menyediakan kendaraan R-2 maupun R-4 untuk uji praktik, namun masih menggunakan transmisi manual. Di setiap Satpas kendaraan R-2 yang tersedia dua unit, tetapi R-4 hanya satu unit, kecuali di Polresta Tanjung Pinang.

Tabel 4.15.
Sarana Uji Praktik Polda Kepulauan Riau

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polresta Bareleng	Tanjung Pinang	Bintan	Tj. Balai Karimun
1	2	3	4	5	6
1	Ranmor untuk ujian :				
	a. Ranmor R2	2	2	2	2
	b. Ranmor R4	1	2	1	1
2	Peralatan Simulator :				
	a. Ranmor R2	4*	2*	1*	1*
	b. Ranmor R4	5*	2*	1*	1*
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-
3	Helm	5	1	1	1
4	Nomor peserta ujian	50	50		50
5	Buku register	5	1	1	1
6	Komputer entri data	5	1	1	1
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	1	1	-
8	Papan nilai :				
	a. Digital	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	1	-
9	Pengeras suara	1	1	1	1
10	Peluit	1	1	1	1
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	1	1
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :				
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	-	30	15	20
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-
14	Marka jalan	10	1	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :				
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	-	-	-	-

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa simulator untuk R-2 dan R-4 tersedia di semua Satpas, tapi dalam kondisi rusak. Selain simulator, semua peralatan dalam keadaan baik. Semua Satpas belum memiliki tanjakan untuk uji praktik. Kerucut lalu lintas sudah tersedia di setiap Satpas tapi tidak dilengkapi sensor. Selain itu umumnya jumlahnya juga kurang, sehingga di beberapa Satpas ditambah dengan patok. Oleh karena patok pengganti jumlahnya juga kurang, maka penggunaannya dilakukan dengan cara bongkar pasang disesuaikan dengan materi uji praktik. Selain itu, jarak pemasangan antara satu patok dengan patok lain juga tidak selalu mengikuti standard yang ditentukan oleh Perka 09 Tahun 2012. Di Polresta Barelang dan Polres Bintan misalnya, jarak antar patok untuk uji slalom kendaraan R2 hanya 1 kali panjang kendaraan, padahal seharusnya 1,5 kali panjang kendaraan. Tentu saja hal itu bisa menyulitkan peserta ujian untuk bisa lulus.

g. Polda Jambi

Sarana uji praktik yang tersedia di Satpas yang diteliti masih kurang lengkap. Beberapa peralatan seperti komputer pengontrol hasil pelaksanaan ujian, papan nilai, alat komunikasi bagi instruktur dan peserta, rambu lalu lintas, marka jalan dan tanjakan belum tersedia. Semua Satpas sudah menyediakan kendaraan R-2 maupun R-4 untuk uji praktik, namun semuanya masih menggunakan transmisi manual. Jumlah kendaraan R2 umumnya lebih dari 1 unit, sedangkan R-4 di setiap Satpas hanya tersedia satu unit, kecuali di Polresta Jambi. Peralatan simulator yang tersedia hanya di Satpas Tanjung Bungo, namun tidak dapat dioperasikan.

Tabel 4.16.
Sarana Uji Praktik Polda Jambi

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polresta Jambi	Muaro Jambi	Batanghari	Bungo	Merangin
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranmor untuk ujian :					
	a. Ranmor R2	2	2	1	2	1
	b. Ranmor R4	2	1	1	-	1
2	Peralatan Simulator :					

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polresta Jambi	Muaro Jambi	Batanghari	Bungo	Merangin
	a. Ranmor R2	2	2	1	1	1
	b. Ranmor R4	2	1	1	1	1
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-	-
3	Helm	2	2	1	1	2
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	1	1	-	-	-
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	-	-	-	-
8	Papan nilai :					
	a. Digital	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	-	-	-	-	-
10	Peluit	-	-	2	1	-
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	40	35	10	-	15
13	Rambu lalu lintas	-	-	1	-	-
14	Marka jalan	-	-	1	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	-	-	-	-	-

h. Polda Kalimantan Tengah

Sarana uji praktik yang tersedia di Satpas yang diteliti masih kurang lengkap. Beberapa peralatan seperti komputer pengontrol hasil pelaksanaan ujian, papan nilai, alat komunikasi bagi instruktur dan peserta, rambu lalu lintas, marka jalan dan tanjakan, serta komputer untuk *entry* data belum tersedia. Kerucut lalu lintas tersedia di semua Satpas, namun tidak menggunakan sensor.

Semua Satpas sudah menyediakan kendaraan R-2 maupun R-4 untuk uji praktik, namun masih menggunakan transmisi manual. Jumlah kendaraan R-2 di setiap Satpas dua unit, sedangkan kendaraan R-4 masing-masing satu unit, kecuali di Polres Palangkaraya. Di Polres Pulang Pisau dan Kapuas tidak tersedia kendaraan uji SIM R-4. Peralatan simulator R-2 dan

R-4 tersedia di setiap Satpas, namun rusak dan tidak dapat dioperasikan.
Selain simulator, semua peralatan dalam keadaan baik.

Tabel 4.17.
Sarana Ujian Praktik Polda Kalimantan Tengah

No	Nama Sarana Uji Praktik	Palangkaraya	Pulang Pisau	Kapuas	Katingan	Kotim	Kobar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ranmor untuk ujian :						
	a. Ranmor R2	2	2	2	2	2	2
	b. Ranmor R4	2	-	-	1	1	1
2	Peralatan Simulator :						
	a. Ranmor R2	2*	1*	1*	1	2*	2*
	b. Ranmor R4	2*	1*	1*	1	2*	2*
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-	-	-
3	Helm	2	3	2	2	2	2
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	-	-	-	-	-	-
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	-	-	-	-	-	-
8	Papan nilai :	-	-	-	-	-	-
	a. Digital	-	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	-	1	-	-	1	1
10	Peluit	2	1	2	2	2	2
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	-	-	-	-
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :						
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	50	80	52	48	32	86
13	Rambu lalu lintas	-	-	-	-	1	1
14	Marka jalan	-	-	-	-	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :						
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	1	-	-	-	1	1

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

i. Polda Sulawesi Tenggara

Sarana uji praktik yang tersedia di beberapa Satpas yang diteliti kurang lengkap. Beberapa peralatan seperti komputer pengontrol hasil pelaksanaan ujian, papan nilai, alat komunikasi bagi instruktur dan peserta, rambu lalu lintas, marka jalan juga belum tersedia. Adapun tanjakan hanya tersedia di beberapa Satpas, namun tidak menggunakan sensor. Begitu pula kerucut lalu lintas, walaupun sudah tersedia di setiap Satpas tapi belum ada yang menggunakan sensor.

Semua Satpas sudah menyediakan kendaraan R-2 maupun R-4 untuk uji praktik, namun masih menggunakan transmisi manual. Jumlah kendaraan R2 umumnya lebih dari 1 unit, sedangkan R-4 di setiap Satpas hanya tersedia satu unit, kecuali di Polres Kendari. Peralatan simulator R-2 maupun R-4 tersedia di beberapa Satpas, namun tidak dapat dioperasikan.

Tabel 4.18.
Sarana Uji Praktik Polda Sulawesi Tenggara

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polres Kendari	Konawe	Kolaka	Bombana	Konawe Selatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranmor untuk ujian :					
	a. Ranmor R2	2	2	2	2	1
	b. Ranmor R4	2	1	1	1	1
2	Peralatan Simulator :					
	a. Ranmor R2	2*	-	-	1*	1*
	b. Ranmor R4	2*	-	-	1*	1*
	c. Ranmor R>4	-	-	-	-	-
3	Helm	2	2	2	2	2
4	Nomor peserta ujian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku register	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Komputer entri data	2	-	1	-	-
7	Komputer pengontrol hasil pelaksanaan uji praktik elektronik	1	-	-	-	-
8	Papan nilai :					
	a. Digital	-	-	-	-	-
	b. Non digital	-	-	-	-	-
9	Pengeras suara	1	1	-	-	-
10	Peluit	2	2	2	2	2
11	Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji	-	-	-	-	2

No	Nama Sarana Uji Praktik	Polres Kendari	Konawe	Kolaka	Bombana	Konawe Selatan
12	Kerucut lalu lintas (traffic cone) :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tidak dilengkapi sensor	40	53	13	20	60
13	Rambu lalu lintas	-	-	1	-	1
14	Marka jalan	-	1	1	-	-
15	Jembatan atau tanjakan :					
	a. Dilengkapi sensor	-	-	-	-	-
	b. Tanpa sensor	1	-	1	-	1

Keterangan: * Dalam kondisi rusak, tidak dapat digunakan

3. Kelengkapan Prasarana Uji Teori

Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM, dalam pasal 19 Ayat (2) disebutkan bahwa prasarana uji teori sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Ruang ujian teori
- b. Ruang tunggu ujian teori; dan / atau
- c. Tenda *portable* untuk pelayanan SIM komunitas

Prasarana uji teori tersebut merupakan kelengkapan ideal yang harus ada di setiap Satpas, untuk mendukung pelaksanaan ujian teori. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa prasarana untuk ujian teori yang tersedia di setiap Polda cukup lengkap, kecuali tenda portabel. Uraian berikut merupakan penjelasan prasarana untuk ujian teori yang tersedia di setiap Polda.

a. Polda Metro Jaya

Prasarana uji teori berupa ruang ujian dan ruang tunggu, sedangkan tenda portabel tidak tersedia. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tenda portabel memang tidak diperlukan, karena hanya digunakan untuk melayani SIM komunitas, sedangkan pelayanan SIM komunitas tidak dilakukan oleh Satpas yang ada di wilayah Polda Metro Jaya.

Khusus di Satpas Daan Mogot terdapat 5 ruangan uji teori, yang digunakan untuk ujian secara *online* maupun secara manual. Adapun di Satpas Polres masing-masing hanya terdapat satu ruang untuk ujian teori. Ruang tunggu peserta ujian teori di setiap Satpas berada di depan setiap ruangan uji teori.

b. Polda Jawa Barat

Di setiap Satpas tidak tersedia tenda portabel. Ruang ujian teori di Satpas Polrestabes Bandung sedang dibongkar dan akan dibangun gedung Satpas yang sesuai dengan *prototype*. Akibatnya layanan uji SIM ikut terganggu. Ruang ujian teori disediakan untuk 15 orang dan dilengkapi dengan AC.

Ruangan untuk ujian teori di Polres Cimahi dilengkapi dengan AC dan masing-masing kursi dengan 1 unit perangkat komputer. Pelayanan SIM di Polres ini sudah mendapatkan ISO pada tahun 2008 dan mendapat penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Polres Cimahi memiliki tempat pelayanan SIM dengan ruang tunggu dalam bentuk tenda, yang terdiri atas 10 bangku kayu. Ruang tunggu pendaftaran cukup nyaman karena dilengkapi dengan AC yang berjumlah 7 unit. Polres Purwakarta memiliki 1 loket pendaftaran dan ruang tunggu pendaftaran yang dilengkapi dengan 8 kursi dan 1 kursi panjang. Kenyamanan pada ruang tunggu masih kurang, karena AC yang tersedia hanya 1 unit.

Polres Subang menyediakan 2 loket untuk pendaftaran pemohon SIM dan di dalam ruangan petugas terdapat 2 meja. Pada layanan ini, Polres Subang sudah menggunakan alat cetak nomor urut. Pada ruang tunggu terdapat 24 kursi, namun tidak disediakan meja untuk mengisi formulir. Polres Karawang memiliki ruang tunggu pendaftaran yang cukup lega dengan jumlah kursi 42 unit. Ruang tunggu ini juga dilengkapi dengan AC sehingga ruangan terasa nyaman. Di ruang tunggu juga diberi nomor urut antrian secara elektronik, yang ditampilkan pada layar. Setelah pemohon mendapatkan nomor antrian, pemohon diarahkan ke ruang ujian teori. Jarak antara ruang pendaftaran dan ruang uji teori terpisah sehingga pemohon harus berjalan ke gedung lain. Di Polres Karawang di ruang tunggu disediakan survei indeks kepuasan masyarakat secara elektronik, dengan cara menekan tombol pada alat yang sudah disediakan.

Polres Bogor Kota menyediakan ruang tunggu pelayanan SIM dengan bangku beton memajang. Pada ruang tunggu tidak tersedia AC sehingga terasa panas. Ruang tunggu pemohon SIM nampak kurang terawat. Polres Bogor memiliki ruang tunggu pendaftaran yang memadai dengan dilengkapi kursi dan AC. Ruangan ini masih baru karena masih dalam tahap pembangunan. Saat ini ruang tunggu untuk ujian teori masih menggunakan tenda dan pemohon duduk pada kursi yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok ujian lainnya. Untuk keluar dan/atau masuk ruang ujian teori, pemohon harus melalui *gate* yang berbeda.

c. Polda Jawa Tengah

Kondisi prasarana untuk ujian SIM di Polrestabes Semarang tidak sesuai dengan standard Perkap Nomor 09 tahun 2012 tentang uji SIM, karena Mako dan Satpas di Polrestabes sedang direnovasi, dan untuk sementara menggunakan gedung dan lapangan serba guna Gedung Olah Raga (GOR) Manunggaljati. Ruang tunggu untuk pendaftaran SIM menggunakan kursi *stainless* dilengkapi dengan penyejuk udara kipas angin dan AC. Antrian untuk pendaftar masih menggunakan sistem manual, yaitu pemohon dipanggil secara berurutan sesuai dengan nomor yang ditulis dibuku registrasi oleh petugas. Di ruang pelayanan juga sudah terdapat loket pembayaran BRI. Ruang pencerahan cukup luas dan dilengkapi dengan monitor komputer dan penyejuk ruangan.

Ruang tunggu ujian teori di Satpas Polres Kudus dilengkapi dengan AC, televisi, ruang pengaduan, ruang menyusui, air mineral, indeks kepuasan masyarakat dan kotak saran/pengaduan yang menggunakan sistem digital dan dievaluasi seminggu sekali. Ruang tunggu di Satpas Polres Demak dilengkapi kotak saran, kotak pengaduan, kotak P3K, televisi, indeks kepuasan masyarakat, speaker, toilet, mushola. Ruang ujian teori ukurannya cukup luas, namun hanya menggunakan kipas angin sebagai penyejuk udara. Hal yang sama di Satpas Polres Semarang, ruang pendaftaran menggunakan AC dan ruang menyusui. Di Satpas Polres Salatiga, sebelum menuju loket pelayanan ditempatkan dua orang Polwan

sebagai penerima tamu di *front office*. Loker pendaftaran, ruang tunggu, loket pembayaran BRI dan tempat bermain anak berada di satu area teras terbuka.

Di Satpas Polres Boyolali, Loker pendaftaran, ruang tunggu, loket pembayaran BRI berada di satu area yang dilengkapi AC. Di Satpas Polres Klaten, sebelum menuju loket pelayanan ditempatkan satu orang penerima tamu wanita di *front office*. Loker pendaftaran, ruang tunggu, loket pembayaran BRI berada di satu area yang dilengkapi AC.

Di Polres Sragen, sebelum menuju loket pelayanan ditempatkan personel Polwan sebagai penerima tamu di *front office*. Loker pendaftaran, ruang tunggu, loket pembayaran BRI berada di satu area yang dilengkapi AC. Ruang ujian teori menggunakan komputer Avis dengan menggunakan tombol dan layar proyektor. Adapun di Polres Surakarta, sebelum menuju loket pelayanan ditempatkan personel Polisi laki-laki sebagai penerima tamu di *front office*. Loker pendaftaran, ruang tunggu dan loket pembayaran BRI berada di satu ruang tertutup. Walaupun ruang tersebut kurang luas, namun sudah dilengkapi AC. Ruang ujian teori menggunakan komputer Avis dengan menggunakan tombol dan layar proyektor.

d. Polda Bali

Di setiap Satpas tidak tersedia tenda portabel untuk ujian teori, karena tidak diperlukan. Ruang ujian teori di setiap tempat ujian umumnya cukup bersih, walaupun sempit, dan beberapa Satpas sudah menggunakan AC. Meskipun demikian beberapa Satpas yang lain hanya menggunakan kipas angin. Di Polresta Denpasar tidak tersedia ruang tunggu ujian teori secara khusus, dan hanya menggunakan lorong yang disediakan kursi, sehingga kurang nyaman. Begitu pula di beberapa Polres lainnya, seperti Tabanan dan Badung, ruang tunggu juga tidak tersedia. Meskipun demikian, di beberapa Polres ruang tunggu ujian teori sudah menggunakan AC sehingga cukup nyaman.

Ruang tunggu yang paling nyaman adalah di Polres Klungkung. Di Polres ini selain disediakan AC, di ruang tunggu juga tersedia monitor TV untuk pemutaran film tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas, sehingga sangat efektif untuk memberikan pencerahan kepada pengunjung. Di beberapa Satpas juga terdapat studio Harkamtibmas berupa ruangan yang digunakan untuk memberikan pencerahan kepada peserta ujian teori dan pengantarnya, dengan memutar film tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Kondisi studio umumnya cukup bagus dan nyaman dengan dilengkapi kursi, AC dan *sound system* seperti di gedung bioskop.

e. Polda Sumatera Barat

Di setiap Satpas tidak tersedia tenda portabel untuk ujian teori, karena tidak diperlukan. Ruang ujian teori di setiap tempat ujian umumnya cukup bersih. Untuk penyejuk udara, semua ruang ujian teori di setiap Satpas menggunakan AC. Ruang tunggu ujian teori umumnya juga bersih, namun di beberapa tempat kondisinya bervariasi. Di ruang tunggu ujian teori ada yang menggunakan AC ada pula yang menggunakan kipas angin. Di ruang tunggu juga tersedia televisi untuk pemohon SIM. Tempat duduk berupa kursi *stainless*. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan pemohon SIM yang sedang menunggu antrian, juga disediakan air mineral gelas secara gratis. Khusus di Satpas Polres Tanah Datar petugas memberikan hadiah bagi peserta yang lulus ujian teori, berupa minuman jeruk secara cuma-cuma.

f. Polda Kepulauan Riau

Di setiap Satpas yang diteliti tidak tersedia tenda portabel untuk ujian teori, karena tidak diperlukan. Prasarana uji teori yang ada berupa ruang ujian teori dan ruang tunggu. Ruang ujian teori di setiap tempat ujian umumnya cukup nyaman dan bersih. Semua ruang ujian teori di setiap Polres menggunakan AC. Ruang tunggu ujian teori umumnya juga bersih, namun di beberapa tempat kondisinya bervariasi.

Di Polresta Barelang, ruang tunggu ujian teori menggunakan AC dan dibantu dengan kipas angin. Di ruang tunggu juga tersedia televisi untuk pemohon SIM dan tempat duduk berupa kursi *stainless*. Di ruang tunggu Satpas Polres Tanjung Pinang juga terdapat TV untuk pemohon SIM, namun tidak tersedia AC maupun kipas angin untuk penyejuk udara. Fasilitas tempat duduk yang tersedia berupa kursi *stainless*, dan dilengkapi *free wifi* yang dapat diakses oleh pengunjung.

Ruang tunggu untuk ujian teori di Satpas Polres Bintan juga dilengkapi kursi *stainless* dan TV untuk pengunjung. Meskipun demikian di Polres ini tidak tersedia AC ataupun kipas angin untuk penyejuk udara, sehingga mengurangi kenyamanan pemohon SIM. Di Polres Tanjung Balai Karimun, ruang tunggu untuk ujian teori cukup bersih dan nyaman. Selain dilengkapi kursi *stainless* dan TV, juga dilengkapi dengan AC untuk penyejuk udara. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan pemohon SIM yang sedang menunggu antrian, juga disediakan air mineral gelas dan permen secara gratis.

g. Polda Jambi

Di setiap Satpas yang diteliti tidak tersedia tenda portabel, karena tidak diperlukan. Hasil observasi dan interview dengan petugas menunjukkan bahwa ruang ujian teori di setiap Satpas cukup nyaman. Di setiap ruangan untuk ujian teori dilengkapi AC, kecuali di Polres Merangin, yang hanya disediakan kipas angin untuk penyejuk udara. Di ruang tunggu uji teori di Polresta dan Polres Merangin juga disediakan monitor yang selalu diisi dengan pemutaran film untuk memberikan sosialisasi kepada pemohon SIM sebelum dipanggil masuk ke ruang ujian. Ruang tunggu peserta uji teori ada di dekat ruangan uji teori. Ruang tunggu untuk uji SIM di setiap Satpas umumnya nyaman dan bersih.

h. Polda Kalimantan Tengah

Di setiap Satpas yang diteliti tidak tersedia tenda portabel untuk ujian teori, karena tidak diperlukan. Ruang ujian teori di Satpas Polres Palangkaraya dilengkapi dengan AC. Ruang tunggu dan pendaftaran SIM

juga dilengkapi AC dan kipas angin, dan disediakan kursi *stainless* untuk 110 orang. Antrean pengambilan SIM di Satpas ini menggunakan sistem elektronik FIFO (*first in first out*), sehingga pemohon dapat melihat nomor antrian dengan jelas melalui monitor TV.

Ruang untuk ujian teori di Satpas Polres Pulang Pisau cukup sempit dan hanya berkapasitas 5 orang, namun dilengkapi AC. Meskipun demikian di ruang tunggu tidak terdapat AC dan kipas angin. Di ruang tunggu hanya disediakan kursi berkapasitas 34 orang, 1 unit TV dan 2 buah *speaker*. Ruang tunggu ujian teori di Satpas Kapuas tidak ada AC, melainkan hanya *exhaust fan* dan 1 kipas angin. Di ruang tunggu disediakan kursi panjang berkapasitas 30 orang. Di ruang pendaftaran digabungkan dengan ruang pencerahan tersedia 1 unit AC dengan kapasitas 10 pendaftar.

Ruang tunggu Satpas Polres Katingan dan Polres Kotawaringin Timur dilengkapi AC. Di Satpas Polres Katingan disediakan kursi untuk 28 orang, TV 1 unit dan *speaker* 2 buah. Untuk Antrian pengambilan SIM juga menggunakan sistem elektronik FIFO. Di ruang uji teori yang berkapasitas 5 orang juga terdapat AC. Sedangkan di Satpas Kotawaringin Timur disediakan kursi untuk 50 orang, 1 unit TV dan tiket elektronik yang dilengkapi dengan monitornya. Di Satpas ini terdapat ruang pencerahan yang digabungkan dengan pengisian formulir dan *audio-visual* dilengkapi dengan 2 unit AC, kursi berkapasitas 14 pemohon dan 2 unit TV serta 1 unit proyektor.

Ruang tunggu Satpas Polres Kotawaringin Barat juga dilengkapi AC, kursi untuk 25 orang, 1 unit TV dan tiket elektronik. Selain itu juga terdapat ruang ASI yang AC-nya terintegrasi dengan ruangan tunggu. Di Satpas ini juga terdapat ruang pencerahan yang berkapasitas 5 orang. Di ruang ini terdapat *exhaust fan* 2 unit untuk penyejuk udara.

i. Polda Sulawesi Tenggara

Ruang tunggu di Satpas Polres Kendari menyatu dengan lorong. Tempat duduk menggunakan kursi plastik dan belum dilengkapi AC atau pun kipas angin. Di Satpas ini juga terdapat ruang pencerahan yang luas dan dilengkapi TV, kipas angin dan toilet.

Ruang tunggu ujian teori di Satpas Polres Konawe terdapat AC, televisi, tempat menyusui, air mineral, sarana survei indeks kepuasan masyarakat dan kotak saran/pengaduan yang dievaluasi seminggu sekali. Ruang tunggu di Satpas Polres Kolaka menyatu dengan lokasi tempat pendaftaran yang menggunakan ruang terbuka. Di ruang ini dilengkapi petunjuk prosedur pembuatan SIM, kotak saran, kotak pengaduan, kotak P3K, televisi, indeks kepuasan masyarakat, speaker, toilet dan mushola. Ruang ujian teori di Satpas ini cukup luas, namun hanya menggunakan kipas angin.

Ruang ujian teori di Satpas Polres Bombana menggunakan AC, dan 1 unit komputer untuk print hasil ujian teori. Di ruang ujian teori ini peserta mendapatkan penjelasan tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas, yang dilakukan secara lisan. Peserta juga diberi penjelasan tentang rambu-rambu lalu lintas dan fungsinya. Ruang tunggu berdekatan dengan ruang ujian teori. Di ruang tunggu dapat AC, dan tempat duduk berupa kursi lipat dan bangku panjang.

Ruang ujian teori di Satpas Polres Konawe Selatan menggunakan komputer *Avis multi system* dengan 4 *stick*. Petugas menampilkan soal ujian melalui layar proyektor, kemudian peserta ujian menjawabnya dengan *stick* yang tersedia. Sebelum ujian dilakukan petugas memberikan pencerahan secara lisan.

4. Kelengkapan Prasarana Uji Praktik

Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM, dalam Pasal 20 Ayat (2) disebutkan bahwa prasarana uji praktik meliputi:

- a. Lapangan uji praktik dengan ketentuan lebar dan panjang lapangan ujian praktik disesuaikan dengan besaran silinder (*cylinder capacity*) dan/atau dimensi motor yang akan digunakan, serta materi ujian pada setiap golongan.
- b. Ruang tunggu ujian praktik.
- c. Perangkat ujian praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem penilaian secara elektronik atau sistem penilaian secara manual.

Di setiap Satpas umumnya sudah tersedia fasilitas lapangan uji praktik, walaupun luasnya belum sesuai dengan Perkap. Lapangan ujian praktik peningkatan golongan SIM ke B2 tidak tersedia di seluruh jajaran. Fasilitas ruang tunggu ujian praktik umumnya tidak tersedia di Satpas, sehingga pemohon menunggu giliran di sekitar area ujian praktik. Perangkat ujian praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor dan sistem penilaian secara elektronik belum tersedia di semua Satpas dan hanya menggunakan sistem penilaian secara manual. Uraian berikut menjelaskan prasarana untuk ujian praktik yang tersedia di setiap Polda.

a. Polda Metro Jaya

Di Satpas Daan Mogot, lapangan uji praktik dan ruang tunggu ujian praktik cukup luas. Lapangan uji praktik bukan hanya untuk R2, tetapi juga untuk R4 dan R6. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan sarana uji tanjakan. Oleh karena lapangan uji praktik cukup luas, maka semua materi uji praktek I dapat dilaksanakan untuk semua golongan SIM. Meskipun demikian untuk uji SIM kendaraan berat seperti trailer, praktik ujinya tidak menggunakan trailer, tetapi menggunakan truk engkel dan simulator. Untuk uji praktik II tidak dilaksanakan.

Lapangan untuk ujian praktik di Satpas lainnya umumnya sempit, sehingga tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan. Di beberapa Satpas terdapat sarana uji tanjakan, namun selain belum menggunakan sensor juga tingkat kemiringannya tidak memenuhi standard. Karena sempitnya lapangan uji praktik maka di Satpas Polres Bekasi Kota justru tidak tersedia sarana uji tanjakan.

b. Polda Jawa Barat

Luas lapangan uji praktik di Satpas yang diteliti secara umum masih di bawah standard, seperti di Polrestabes Bandung, Polres Cimahi, Purwakarta dan Subang dan Polres Bogor kota. Oleh karena luas lapangan uji praktik tidak mencukupi, maka tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan. Lapangan uji praktik yang luasnya mencukupi hanya terdapat di Satpas Polres Bogor. Di Satpas ini lapangan uji praktik tertutup sehingga tidak bisa dilihat dari luar.

Ruang tunggu untuk uji praktik tidak tersedia di Satpas Polrestabes Bandung dan Polres Bogor Kota. Di Polres Karawang juga tidak tersedia ruang tunggu khusus untuk uji praktik, namun di lapangan uji praktik disediakan kursi untuk peserta ujian. Ruang tunggu ujian praktik di Polres Bogor terletak di sisi lapangan praktik dan disediakan kursi untuk peserta ujian sekitar 30 unit.

c. Polda Jawa Tengah

Luas lapangan uji praktik yang terdapat di Satpas yang menjadi obyek penelitian umumnya di bawah standard, kecuali di Polres Klaten. Oleh karena luas lapangan untuk uji praktik tidak mencukupi, maka beberapa Satpas meminjam lapangan instansi lain, seperti lapangan milik Pemda untuk digunakan sebagai tempat uji praktik. Ruang tunggu untuk ujian praktik umumnya juga tidak tersedia dan untuk menunggu antrian ujian praktik juga tidak disediakan tempat duduk.

d. Polda Bali

Satpas yang menjadi obyek penelitian umumnya tidak menyediakan ruang tunggu untuk peserta ujian praktik, bahkan tidak tersedia tempat duduk bagi pemohon yang antri mengikuti ujian praktik. Satu-satunya ruang tunggu yang tersedia untuk ujian praktik hanya terdapat di Polres Klungkung.

Lapangan uji praktik umumnya sempit, sehingga hampir semua Satpas tidak menyediakan uji tanjakan. Untuk keperluan tersebut beberapa Satpas memanfaatkan jalan menanjak untuk uji tanjakan. Oleh karena lapangan uji praktik sempit, maka tidak semua materi ujian praktik bisa diujikan. Bahkan di Satpas Polres Gianyar dan Klungkung, uji praktik I untuk kendaraan R4 tidak dilaksanakan sama sekali.

e. Polda Sumatera Barat

Luas lapangan untuk uji praktik umumnya di bawah standard. Karena itu di beberapa Satpas tidak tersedia sarana uji tanjakan. Akibatnya, beberapa materi ujian praktik tidak dapat diujikan. Di Satpas Polres Payakumbuh ujian praktik kendaraan R4 justru tidak dilaksanakan sama sekali. Di ruang tunggu ujian praktik tidak tersedia kursi sehingga peserta uji praktik harus menunggu sambil berdiri.

f. Polda Kepulauan Riau

Ruang tunggu untuk ujian praktik di Satpas yang menjadi obyek penelitian umumnya tidak nyaman. Di Polresta Bareleng, ruang tunggu hanya berupa tenda seluas 2 kali 2 meter, tanpa dilengkapi kipas angin, sehingga terasa panas. Selain itu di ruang tunggu juga tidak tersedia kursi sehingga peserta uji praktik menunggu sambil berdiri. Di Satpas Polres lainnya juga tidak tersedia ruang tunggu untuk peserta uji praktik, sehingga peserta uji praktik harus menunggu di tempat terbuka dengan berdiri.

Lapangan uji praktik di Polresta Bareleng dan Polres Karimun cukup luas, walaupun di Polresta Bareleng masih menggunakan lahan kosong milik Badan Pengelola (BP) Batam. Adapun di Polres Tanjung Pinang dan Bintan lapangan uji praktik berhimpitan dengan tempat parkir kendaraan. Oleh karena lapangan uji praktik tidak luas, maka di beberapa Satpas seperti di Polres Tanjung Pinang dan Bintan tidak memiliki uji tanjakan, dan untuk uji tanjakan hanya memanfaatkan jalan yang menanjak.

g. Polda Jambi

Prasarana uji praktik yang terdapat di Satpas yang menjadi obyek penelitian yaitu lapangan uji praktik dan ruang tunggu uji praktik. Adapun perangkat ujian praktik yang dilengkapi dengan peralatan sensor sama sekali tidak tersedia, begitu pula perangkat penilaian elektronik untuk uji praktik. Hal itu karena dalam uji praktik tidak ada pemberian nilai, tetapi hanya dicatat dalam komputer hasilnya lulus atau tidak lulus.

Terdapat dua Satpas yang memiliki lapangan uji praktik di luar Polres, yaitu menempati lahan milik KONI. Kedua Satpas itu adalah Satpas Polres Batanghari dan Polres Merangin. Lapangan uji praktik R-4 di Satpas Polres Batanghari cukup luas, yaitu memiliki panjang sekitar 40 m dan lebar sekitar 50 m. Sedangkan untuk uji praktik R-4 di Polres Merangin memiliki panjang sekitar 40 m dan lebar sekitar 8 m. Meskipun demikian, sarana uji tanjakan tidak tersedia di dua Satpas tersebut, dan untuk uji tanjakan menggunakan jalan raya yang menanjak. Berbeda dengan lapangan uji praktik R-4, untuk uji praktik R-2 tidak tersedia lapangan khusus, tetapi menjadi satu dengan tempat parkir motor dan mobil.

Di setiap Satpas umumnya tidak tersedia ruang tunggu untuk ujian praktik secara khusus, kecuali di Satpas Polres Muaro Jambi dan Polresta Jambi. Di kedua Satpas tersebut tersedia ruang tunggu dengan dinding terbuka. Walaupun ruang tunggu terbuka, namun udara terasa panas karena di ruang tunggu terdapat tiga AC *outdoor* untuk pembuangan udara panas. Di Merangin ruang tunggu ujian praktik R2 berdampingan dengan ruang uji teori, karena tempat ujian praktiknya berdekatan. Namun ruang tunggu untuk ujian praktik R4 berada di halaman gedung KONI, dan tidak disediakan tempat duduk.

h. Polda Kalimantan Tengah

Luas lapangan uji praktik di Satpas yang diteliti umumnya sempit. Untuk menyiasatinya maka pelaksanaan ujian praktik dilakukan secara bergantian antara kendaraan R-2 dan R-4, yaitu ujian praktik R-2

dilaksanakan sebelum pukul 12.00 dan untuk R-4 setelah pukul 12.00. Di Satpas Polres Pulang Pisau lapangan uji praktik dilakukan secara bongkar pasang, karena menggunakan halaman samping Polres.

Lapangan uji praktik di Satpas Polres Kapuas hanya bisa digunakan untuk kendaraan R-2, sedangkan uji praktik kendaraan R-4 menggunakan jalan lingkungan. Di Satpas Polres Katingan uji kendaraan R-2 juga dilaksanakan di badan jalan Polres. Oleh karena itu penempatan patoknya tidak permanen, tetapi dilakukan bongkar pasang. Karena lapangan uji praktik terbatas, maka tanjakan uji praktik R-4 juga menggunakan jalan lingkungan.

Lapangan uji praktik di Satpas Polres Kotawaringin Timur juga hanya bisa digunakan untuk R-2, sedangkan uji praktik R4 menggunakan halaman stadion. Di Satpas Polres Kotawaringin Barat sudah tersedia lapangan uji praktik, namun jaraknya sekitar 2 KM dari Satpas.

Ruang tunggu untuk ujian praktik umumnya tidak tersedia, dan untuk menunggu ujian praktik juga tidak tersedia tempat duduk. Di Satpas Polres Palangkaraya ruang tunggu untuk peserta ujian praktik tergabung dengan ruang tunggu ujian teori.

i. Polda Sulawesi Tenggara

Luas lapangan uji praktik di Satpas yang diteliti umumnya belum memenuhi syarat yang ideal, kecuali di Polres Konawe dan Polres Konawe Selatan. Oleh karena itu tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan. Di Polres Kendari misalnya, ujian praktik untuk R4 hanya meliputi pengereman, maju mundur jalan sempit, zigzag, slalom, dan uji tanjakan. Adapun untuk R2, materi yang diujikan hanya keseimbangan, angka 8 dan zigzag. Begitu pula di Satpas-Satpas lainnya.

Ruang tunggu untuk ujian praktik umumnya juga tidak tersedia, dan untuk menunggu ujian praktik juga tidak tersedia tempat duduk. Oleh karena luas lapangan untuk uji praktik tidak mencukupi, maka tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan.

5. Efektivitas Sarana dan Prasarana Uji SIM

Efektivitas sarana dan prasarana adalah dukungan sarana dan prasarana terhadap keberhasilan pencapaian organisasi dalam memberikan layanan publik. Dalam kaitannya dengan pelayanan SIM, maka efektivitas sarana dan prasarana itu diukur dari dukungan keduanya terhadap keberhasilan pelayanan SIM.

a. Efektivitas Sarana Uji Teori

Efektivitas sarana uji teori dilihat berdasarkan kemampuannya mendukung kelancaran pelaksanaan ujian teori. Secara umum sarana uji teori yang ada di setiap Satpas seluruh Polda masih kurang efektif, karena perangkat komputer yang digunakan masih berteknologi lama, dan menggunakan jaringan dengan *bandwidth* kecil. Sistem ujian *online* yang dilakukan di semua Polda juga belum efektif karena menggunakan *server* yang ada di Korlantas Polri, sehingga lalu lintas data menjadi padat. Akibatnya *server* di Korlantas Polri terkadang *down* sehingga mengganggu pelaksanaan ujian *online* secara menyeluruh. Uraian berikut menjelaskan efektivitas sarana uji teori di setiap Polda.

1) Polda Metro Jaya

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian cukup efektif, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta lainnya. Keberadaan meja dan kursi pengawas buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian juga efektif, yaitu sangat mendukung pelaksanaan ujian sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* juga sudah didukung oleh jaringan data yang cukup baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Meskipun demikian, khusus di Daan Mogot dan di Polres Tangerang Kota, jaringan yang terhubung dengan *server* Korlantas Polri kurang efektif karena lalu lintas data padat, sehingga *server* di Korlantas Polri sering *down* dan mengganggu pelaksanaan ujian *online*. Selain itu, ujian teori yang

hanya dilakukan secara *online* kurang efektif, karena masih banyak peserta ujian yang tidak terbiasa menggunakan komputer.

Proyektor di tempat ujian teori yang mestinya digunakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta ujian tidak digunakan, karena dianggap kurang efektif. Penjelasan yang diberikan dengan menggunakan proyektor membutuhkan waktu lebih lama, padahal mereka butuh waktu yang cepat agar pelaksanaan ujian teori bisa segera dilaksanakan. Keberadaan printer *barcode* sangat mendukung peserta ujian untuk segera mengetahui hasil ujian teori, dan proses pencetakan juga berlangsung cepat.

2) Polda Jawa Barat

Sarana komputer untuk ujian teori secara *online* di Polrestabes Bandung cukup efektif, karena didukung jaringan Internet yang baik yang terhubung dengan *server* di Korlantas Polri. Meskipun demikian ujian teori yang hanya dilakukan secara *online* kurang efektif, karena masih banyak peserta ujian yang tidak terbiasa menggunakan komputer. Sarana komputer AVIS untuk ujian teori di semua Polres juga efektif karena kapasitas RAM-nya memadai.

3) Polda Jawa Tengah

Keberadaan satu meja dan kursi untuk setiap peserta ujian cukup efektif karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta lainnya. Keberadaan meja dan kursi pengawas penempatannya juga memudahkan petugas untuk mengawasi jalannya ujian. Selain itu, keberadaan buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian sangat mendukung pelaksanaan ujian dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* hanya di Polrestabes Semarang yang sudah didukung oleh jaringan data yang cukup baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Meskipun demikian data untuk peserta ujian teori yang menggunakan akses data E-KTP kurang efektif, karena sering

muncul identitas orang lain, yang disebabkan nomor NIK yang ditulis kurang akurat. Selain itu, ujian teori yang hanya dilakukan secara *online* kurang efektif, karena masih banyak peserta ujian yang tidak terbiasa menggunakan komputer.

Layar proyektor di ruang ujian teori kurang efektif untuk memberikan sosialisasi kepada peserta ujian teori, karena waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan penjelasan secara lisan. Oleh karena itu sosialisasi secara lisan yang didukung dengan pemutaran video tentang peraturan lalu lintas dan tata cara menjawab soal-soal ujian dianggap lebih efektif, karena peserta dapat bertanya secara langsung jika ada yang kurang jelas.

4) Polda Bali

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian cukup efektif, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta ujian lainnya. Keberadaan meja dan kursi pengawas buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian juga efektif karena sangat mendukung pelaksanaan ujian sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di Polresta sudah didukung oleh jaringan data yang cukup baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Meskipun demikian, ujian teori yang hanya dilakukan dengan sistem *online* menjadi tidak efektif bagi peserta yang tidak terbiasa mengoperasikan komputer, walaupun pengoperasiannya dipandu oleh petugas. Hasil wawancara dengan petugas diketahui bahwa umumnya peserta ujian *online* yang tidak bisa mengoperasikan komputer juga tidak lulus.

Sosialisasi yang dilakukan secara lisan dianggap efektif oleh para petugas, karena peserta langsung dapat bertanya jika ada yang kurang jelas. Oleh karena itu, walaupun di Satpas-Satpas tidak

tersedia proyektor namun tidak menghambat kegiatan sosialisasi oleh petugas.

5) Polda Sumatera Barat

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian cukup efektif, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta ujian lainnya. Keberadaan meja dan kursi pengawas buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian juga efektif, yaitu sangat mendukung pelaksanaan ujian sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di Polresta Padang juga efektif karena didukung oleh jaringan data yang cukup baik. Meskipun demikian, ujian teori yang hanya dilakukan dengan sistem *online* kurang efektif bagi peserta yang tidak bisa mengoperasikan komputer, walaupun pengoperasiannya dipandu oleh petugas. Oleh karena itu penggunaan sistem ujian *online* bagi peserta yang tidak bisa komputer itu tidak efektif, karena hasilnya tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya peserta ujian.

Pelayanan peningkatan golongan SIM dianggap kurang efektif, karena hanya dipusatkan di Ditlantas Polda Sumatera Barat yaitu dengan menggunakan simulator. Untuk itu, Ditlantas Polda mengupayakan mendekatkan layanan dalam bentuk rayonisasi.

6) Polda Kepulauan Riau

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian cukup efektif, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta ujian lainnya. Keberadaan meja dan kursi pengawas buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian juga sangat efektif, yaitu sangat mendukung pelaksanaan ujian sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di Polresta Barelang sudah didukung oleh jaringan data yang cukup baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Meskipun demikian, ujian teori yang hanya dilakukan dengan sistem *online* tidak efektif, karena tidak semua peserta bisa mengoperasikan komputer, walaupun pengoperasiannya dipandu oleh petugas. Hasil ujian yang diperoleh peserta yang tidak bisa mengoperasikan komputer tidak mencerminkan kemampuannya yang sebenarnya. Akibatnya banyak peserta ujian *online* yang tidak lulus. Khusus di Polres Karimun, penggunaan komputer untuk mendukung pelayanan SIM belum efektif, karena aliran listrik sering diputus kalau sedang hujan, supaya tidak disambar petir.

Peralatan proyektor atau layar LCD kurang efektif untuk memberikan sosialisasi kepada peserta uji SIM, karena waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan sosialisasi secara lisan yang dianggap lebih efektif, karena peserta dapat langsung bertanya jika ada yang kurang jelas.

7) Polda Jambi

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian teori sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian teori, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta lainnya. Penempatan meja dan kursi pengawas juga efektif karena memudahkan petugas mengawasi jalannya ujian. Begitu pula keberadaan buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian, sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di Polresta Jambi cukup efektif karena didukung oleh jaringan data yang cukup baik. Meskipun demikian, ujian teori yang hanya dilakukan dengan sistem *online* kurang efektif bagi peserta yang tidak bisa mengoperasikan komputer, karena hasilnya tidak mencerminkan

kemampuannya yang sebenarnya. Walaupun pengoperasian komputer sudah dipandu oleh petugas, namun umumnya mereka tidak lulus, bahkan ada yang menempuh ujian teori sampai 8 kali.

Sosialisasi tentang teknis pelaksanaan ujian dan tentang keamanan berlalu lintas dapat dilaksanakan secara efektif, walaupun tidak tersedia proyektor. Sosialisasi secara lisan dapat diberikan lebih cepat, dan peserta dapat langsung bertanya jika ada yang kurang jelas.

8) Polda Kalimantan Tengah

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian teori, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta lainnya. Penempatan meja dan kursi pengawas juga efektif karena memudahkan petugas untuk mengawasi jalannya ujian. Begitu pula keberadaan buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian, sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di hampir semua Satpas sudah didukung oleh jaringan komputer yang memadai sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Oleh karena semua data uji SIM disimpan dalam *database* di Korlantas, maka integrasi data antara satu proses dengan proses lain dalam uji SIM sudah bisa dilakukan sehingga petugas tidak perlu melakukan *entry* ulang data yang sama. Meskipun demikian hal itu menimbulkan permasalahan, yaitu bergantung pada kemampuan sistem yang ada di Korlantas. Jika *server* yang ada di Korlantas *down*, maka akan berimbas pada uji teori *online* dan kegiatan lainnya dalam proses uji SIM di setiap Polres, sehingga layanan uji SIM di semua Satpas terhenti. Akan lebih efektif jika aplikasi tersebut juga terpasang di tingkat lokal, dan sinkronisasi data yang ada di Pusat dan data yang ada di lokal dapat dilakukan

setelah selesai layanan SIM. Selain itu, ujian teori yang hanya dilakukan secara *online* kurang efektif, karena masih banyak peserta ujian yang tidak terbiasa menggunakan komputer.

Penggunaan layar monitor untuk sosialisasi terhadap pemohon SIM yang akan melaksanakan ujian teori kurang efektif, karena membutuhkan waktu lama, padahal mereka butuh waktu yang cepat agar pelaksanaan ujian teori bisa segera dilaksanakan. Oleh karena itu penjelasan secara lisan dianggap lebih efektif, karena peserta dapat langsung bertanya jika ada yang kurang jelas.

Pelayanan untuk peningkatan golongan di 3 (tiga) tempat yaitu Mapolda Kalimantan Tengah, Polres Kotawaringin Barat dan Polres Barito Utara masih kurang efektif, karena beberapa simulator R-4 / R-6 ada yang rusak, dan perbaikannya terkendala anggaran.

9) Polda Sulawesi Tenggara

Keberadaan satu meja dan satu kursi untuk setiap peserta ujian sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian teori, karena peserta ujian tidak terganggu oleh peserta lainnya. Penempatan meja dan kursi pengawas juga efektif karena memudahkan petugas mengawasi jalannya ujian. Begitu pula keberadaan buku register, nomor peserta ujian dan printer hasil ujian, sangat efektif mendukung pelaksanaan ujian sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Penggunaan komputer untuk ujian teori secara *online* di Polres Kendari sudah didukung oleh jaringan data yang cukup baik, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan ujian teori. Meskipun demikian, ujian teori yang hanya dilakukan dengan sistem *online* kurang efektif bagi peserta yang tidak bisa mengoperasikan komputer, yaitu hasilnya banyak yang tidak lulus.

Walaupun di beberapa Satpas tidak terdapat proyektor untuk memberikan sosialisasi kepada peserta ujian teori, namun

sosialisasi tetap dapat dilaksanakan dengan efektif, walaupun secara lisan. Hal itu karena waktu yang dibutuhkan dapat lebih cepat, dan peserta dapat langsung bertanya jika ada yang kurang jelas.

b. Efektivitas Sarana Uji Praktik

Efektivitas sarana uji praktik dilihat dari kemampuannya mendukung pelaksanaan ujian praktik. Secara keseluruhan sarana uji praktik berupa kendaraan R-2 dan R-4 yang digunakan kurang efektif. Selain karena jumlah kendaraan yang tersedia masih terbatas, juga umumnya masih menggunakan transmisi manual. Padahal pemohon yang akan diuji banyak yang menggunakan kendaraan bermotor transmisi otomatis. Uraian berikut menjelaskan tentang efektivitas sarana uji praktik di setiap Polda.

1) Polda Metro Jaya

Jumlah kendaraan bermotor untuk uji praktik di setiap Satpas sudah mencukupi, terutama untuk kendaraan R-2. Meskipun demikian di beberapa Satpas masih kurang efektif karena belum menyediakan kendaraan yang memiliki transmisi otomatis. Mobil untuk uji praktik di setiap Satpas jumlahnya juga mencukupi, namun kurang efektif karena yang tersedia hanya mobil dengan transmisi manual. Selain itu, mobil untuk uji praktik peningkatan golongan ke SIM B1 dan B2 yang dipusatkan di Satpas Daan Mogot belum efektif mendukung tujuan pemberian SIM B1 dan B2, yaitu untuk mengetahui ketrampilan mengemudikan kendaraan jenis bus dan truck gandeng, karena yang tersedia hanya truck angkel.

Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

2) Polda Jawa Barat

Kendaraan R-2 dan R-4 untuk uji praktik yang hanya menggunakan transmisi manual kurang efektif, karena banyak peserta yang hanya dapat mengendarai kendaraan dengan transmisi otomatis. Simulator untuk R2 tersedia di setiap Satpas juga tidak efektif, karena rusak dan tidak dapat digunakan.

3) Polda Jawa Tengah

Kendaraan bermotor R-4 maupun R-2 di setiap Satpas belum efektif mendukung ujian praktik, karena jumlahnya tidak mencukupi. Selain itu kendaraan yang tersedia juga hanya menggunakan transmisi manual, sehingga kurang efektif, walaupun pemohon SIM dibolehkan menggunakan kendaraan sendiri.

Untuk keperluan uji praktik, beberapa Polres sudah memiliki kerucut lalu lintas, namun jumlahnya masih kurang sehingga diganti dengan patok dari paralon atau kayu yang dicat. Sistem bongkar pasang penggunaan patok yang disesuaikan dengan keperluan uji praktik untuk R-2 atau R-4 kurang efektif, karena membutuhkan waktu sehingga tidak efisien. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian yang tersedia di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, yaitu hanya digunakan jika pesertanya banyak.

4) Polda Bali

Jumlah kendaraan bermotor R-4 dan R-2 untuk uji praktik di setiap Satpas sudah mencukupi, namun kurang efektif karena hanya bertransmisi manual. Padahal banyak pengendara motor yang hanya bisa mengendarai motor dengan transmisi otomatis. Memang peserta dibolehkan menggunakan motor sendiri, namun hal itu menunjukkan kurang kesiapan dalam memberikan pelayanan.

Walaupun di beberapa Satpas sudah memiliki kerucut lalu lintas, atau yang belum memiliki menggantinya dengan patok dari paralon

yang diisi besi, namun jarak pemasangan antara satu patok dengan patok yang lain juga tidak selalu mengikuti standard yang ditentukan dalam Perkap Nomor 09 Tahun 2012. Di beberapa Satpas jarak antar patok lebih sempit dari yang seharusnya, yaitu 1,5 kali panjang motor. Ini tidak efektif mendukung kelancaran pelaksanaan ujian praktik, karena terkesan mempersulit peserta ujian. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

5) Polda Sumatera Barat

Kendaraan bermotor R-4 dan R-2 untuk uji praktik di Satpas Polresta Padang masih belum mencukupi, walaupun jumlahnya cukup banyak, namun di Satpas yang lain jumlahnya sudah cukup. Meskipun demikian pada umumnya masih kurang efektif karena tidak tersedia kendaraan bertransmisi otomatis. Padahal banyak pengendara motor yang hanya bisa mengendarai motor dengan transmisi otomatis.

Di beberapa Satpas penggunaan patok untuk ujian teori juga kurang efektif, karena jarak antara satu patok dengan patok yang lain tidak mengikuti standard yang ditentukan dalam Perkap Nomor 09 Tahun 2012. Penggunaan patok sebagai pengganti kerucut untuk ujian praktik sebetulnya cukup bagus, namun menjadi kurang efektif karena dilakukan dengan cara bongkar pasang, disesuaikan dengan materi uji praktik. Dengan cara seperti itu tentu saja waktu yang digunakan untuk uji praktik menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

6) Polda Kepulauan Riau

Kendaraan bermotor R-2 dan R-4 untuk uji praktik di setiap Satpas jumlahnya sudah mencukupi, dibandingkan jumlah peserta ujian SIM. Di beberapa Satpas Kendaraan R-4 dan R-2 cukup efektif, karena tersedia jenis manual maupun otomatis. Meskipun demikian di beberapa Satpas lainnya, seperti Satpas Polres Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun, kendaraan yang tersedia hanya manual sehingga kurang efektif.

Penggunaan patok untuk menggantikan kerucut sebagai sarana ujian praktik cukup bagus, namun di beberapa Satpas jarak pemasangan antara satu patok dengan patok yang lain tidak mengikuti standard yang ditentukan dalam Perkap 09 Tahun 2012 sehingga kurang efektif, bahkan terkesan mempersulit pemohon SIM. Ini dapat dilihat di Polresta Bareleng dan Polres Bintan, jarak antar patok untuk uji slalom kendaraan R-2 hanya 1 kali panjang kendaraan, padahal seharusnya 1,5 kali panjang kendaraan.

Penggunaan patok yang dilakukan secara bongkar pasang disesuaikan dengan materi uji praktik karena kekurangan jumlah patok juga tidak efektif, karena waktu yang digunakan untuk uji praktik menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

7) Polda Jambi

Jumlah kendaraan bermotor R-2 maupun R-4 untuk uji praktik di Polresta Jambi sudah mencukupi dibandingkan jumlah peserta yang harus dilayani, dan sudah tersedia transmisi manual maupun transmisi otomatis. Meskipun demikian, walaupun di Satpas lain jumlahnya sudah mencukupi, tapi tidak efektif karena hanya menyediakan kendaraan manual.

Penggunaan patok untuk ujian praktik belum efektif, karena di beberapa Satpas jarak pemasangan antara satu patok dengan patok lain belum mengikuti standard yang telah ditentukan, sehingga terkesan mempersulit peserta ujian. Penggunaan patok yang dilakukan dengan cara bongkar pasang juga tidak efektif, walaupun hal itu disesuaikan dengan materi uji praktik, karena waktu yang digunakan menjadi lebih lama.

8) Polda Kalimantan Tengah

Kendaraan bermotor R-2 maupun R-4 untuk uji praktik di beberapa Satpas kurang efektif, karena tidak menyediakan kendaraan dengan transmisi otomatis. Di beberapa Satpas bahkan tidak memiliki kendaraan R4 untuk ujian praktik. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

9) Polda Sulawesi Tenggara

Jumlah kendaraan bermotor R-4 maupun R-2 untuk uji praktik di setiap Satpas sudah mencukupi, namun belum efektif dalam memberikan pelayanan karena tidak disediakan kendaraan dengan transmisi otomatis. Walaupun pemohon diperbolehkan menggunakan motornya sendiri, namun hal itu menunjukkan kurang siapnya Satpas dalam memberikan pelayanan. Jarak pemasangan antara satu patok dengan patok lain yang tidak memenuhi standard juga tidak efektif, karena mempersulit pemohon untuk dapat lulus. Pengeras suara untuk memberikan informasi kepada peserta ujian di setiap tempat uji praktik sebetulnya cukup efektif, namun penggunaannya tidak optimal, karena hanya digunakan jika pesertanya banyak.

c. Efektivitas Prasarana Uji Teori

Efektivitas prasarana uji teori dilihat dari dukungan terhadap kenyamanan peserta ujian teori. Pada umumnya prasarana uji teori yang tersedia di setiap Polda sudah efektif, yaitu mendukung kenyamanan pemohon yang sedang menunggu giliran untuk dipanggil. Meskipun demikian di beberapa Satpas prasarana yang tersedia masih belum efektif. Uraian berikut menjelaskan efektivitas prasarana uji teori yang ada di setiap Polda.

1) Polda Metro Jaya

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih dan menggunakan AC, sehingga efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Ruang tunggu ujian teori juga bersih, namun di beberapa Satpas kondisinya berbeda-beda. Di Satpas Daan Mogot dan Polres Bekasi Kota, ruang tunggu ujian teori menggunakan AC dan tempat duduk *stainless*. Meskipun demikian di beberapa Satpas yang lain ruang tunggu hanya dilengkapi kipas angin untuk penyejuk udara, dan tempat duduk terbuat dari kayu, sehingga kurang efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

2) Polda Jawa Barat

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih dan dilengkapi AC, sehingga efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Khusus di Satpas Polres Purwakarta belum tersedia ruang tunggu yang efektif untuk mendukung kenyamanan peserta ujian teori, dan peserta ujian menunggu panggilan dengan duduk di sekitar halaman Mapolres.

3) Polda Jawa Tengah

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih, bahkan di beberapa Polres sudah menggunakan AC dan kipas angin, sehingga cukup efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori. Di beberapa Satpas, ruang tunggu juga dilengkapi air minum, ruang laktasi, TV,

free wifi, kotak saran, Indeks Kepuasan Masyarakat dan perpustakaan mini. Meskipun demikian di beberapa Satpas lain belum tersedia ruang tunggu secara khusus, tetapi menggunakan ruang tunggu di tempat pendaftaran yang ada kursinya. Dengan demikian belum efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori.

4) Polda Bali

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih, walaupun sempit. Di beberapa Satpas sudah menggunakan AC untuk penyejuk udara, walaupun di beberapa Satpas yang lain hanya menggunakan kipas angin. Meskipun demikian tergolong efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

Ruang tunggu ujian teori di beberapa Satpas juga sudah menggunakan AC sehingga efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Ruang tunggu yang paling nyaman adalah di Satpas Polres Klungkung. Selain dilengkapi AC, di ruang tunggu juga tersedia monitor TV yang memutar film tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas, sehingga sangat efektif untuk memberikan sosialisasi kepada pengunjung. Meskipun demikian, di Satpas Polresta Denpasar dan beberapa Satpas lainnya, seperti Satpas Polres Tabanan dan Badung tidak tersedia ruang tunggu secara khusus, tetapi hanya menggunakan lorong yang disediakan kursi, sehingga kurang efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

Studio Harkamtibmas yang terdapat di beberapa Satpas cukup efektif untuk memberikan pencerahan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Meskipun demikian efektivitasnya belum maksimal, karena hanya digunakan untuk memberikan pencerahan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas kepada pemohon SIM dan orang yang mengantarnya.

5) Polda Sumatera Barat

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih dan menggunakan AC, sehingga efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori. Ruang tunggu ujian teori umumnya juga bersih, namun ada yang menggunakan AC dan ada yang hanya menggunakan kipas angin. Di ruang tunggu juga tersedia televisi untuk pemohon SIM. Tempat duduk berupa kursi yang terbuat dari *stainless*. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan pemohon SIM yang sedang menunggu antrian, juga disediakan air mineral gelas secara gratis. Bahkan di Satpas Polres Tanah Datar, peserta yang lulus ujian teori diberi hadiah minuman jeruk secara cuma-cuma. Dengan demikian, ruang tunggu yang tersedia cukup efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori.

6) Polda Kepulauan Riau

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih dan menggunakan AC. Jadi cukup efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori. Ruang tunggu ujian teori umumnya juga bersih, namun di beberapa Satpas kondisinya berbeda-beda. Di Satpas Polresta Bareleng, ruang tunggu ujian teori menggunakan AC ditambah kipas angin. Di ruang tunggu juga tersedia tempat duduk berupa bangku *stainless* dan televisi. Di Satpas Tanjung Balai Karimun bahkan disediakan air mineral dan permen secara gratis bagi peserta ujian teori yang sedang menunggu dipanggil. Dengan demikian cukup efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori. Hal itu berbeda dengan ruang tunggu di Satpas Polres Tanjung Pinang dan Polres Bintan. Di dua Satpas tersebut tidak tersedia penyejuk udara, baik AC maupun kipas angin, sehingga belum efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

7) Polda Jambi

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih dan menggunakan AC, sehingga efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Ruang

tunggu ujian teori umumnya juga bersih, namun di beberapa Satpas kondisinya berbeda-beda. Di Satpas Polresta Jambi, ruang tunggu ujian teori berada di tempat terbuka, sehingga tidak mendukung kenyamanan peserta ujian. Kondisi tersebut berbeda dengan di Satpas Polres Merangin, karena ruang tunggu untuk ujian teori dilengkapi dengan kursi *stainless*, Kipas angin, TV dan nomor antrian otomatis untuk pengunjung. Begitu pula ruang tunggu di Polres Batanghari, selain dilengkapi kursi *stainless* dan TV, juga dilengkapi AC untuk penyejuk udara. Untuk mendukung kenyamanan pemohon SIM yang sedang menunggu antrian, di ruang tunggu juga disediakan air mineral dan permen secara gratis. Di Polres Bungo bahkan terdapat *Wifi* yang dapat diakses secara bebas oleh pengunjung. Semua itu sangat efektif mendukung kenyamanan peserta ujian teori.

8) Polda Kalimantan Tengah

Ruang ujian teori di seluruh Satpas cukup bersih dan dilengkapi dengan AC, sehingga cukup efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Ruang tunggu peserta ujian di beberapa Satpas juga cukup efektif mendukung kenyamanan peserta yang menunggu giliran untuk dipanggil, seperti di Satpas Polres Palangkaraya, Katingan, Kotawaringin Timur dan Kota Waringin Barat. Di Satpas Polres Palangkaraya dan Polres Katingan, antrian pengambilan SIM bahkan sudah menggunakan sistem elektronik FIFO (*first in first out*), sehingga pemohon dapat melihat nomor antrian dengan jelas melalui monitor TV.

Kondisi tersebut berbeda dengan di Satpas Polres Kapuas dan Polres Pulang Pisau. Di Satpas Kapuas ruang tunggu yang tersedia kurang nyaman karena hanya menggunakan *exhaust fan* dan kipas angin, sehingga terasa panas. Di Satpas Polres Pulang Pisau bahkan tidak tersedia kipas angin sama sekali, sehingga tidak mendukung kenyamanan peserta ujian teori.

9) Polda Sulawesi Tenggara

Ruang ujian teori di setiap Satpas cukup bersih walaupun sempit. Di beberapa Satpas terdapat AC, namun di beberapa Satpas yang lain hanya menggunakan kipas angin. Meskipun demikian keseluruhan ruang ujian teori tergolong efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

Di beberapa Satpas ruang tunggu ujian teori belum tersedia secara khusus, tetapi hanya menggunakan lorong yang disediakan kursi, sehingga kurang efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Ruang tunggu yang tergolong efektif mendukung kenyamanan peserta ujian berada di Satpas Polres Konawe Selatan. Selain menggunakan AC, di ruang tunggu juga disediakan minuman ringan (*softdrink*) dingin secara cuma-cuma. Di ruang tunggu juga terdapat monitor yang digunakan untuk sosialisasi dengan pemutaran film tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas.

d. Efektivitas Prasarana Uji Praktik

Efektivitas prasarana uji praktik dilihat dari dukungan terhadap kenyamanan peserta yang akan melaksanakan ujian praktik, dan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan ujian praktik. Secara umum ruang tunggu untuk peserta yang akan melaksanakan ujian praktik masih belum mendukung kenyamanan peserta ujian. Selain itu, lapangan uji praktik yang tersedia juga belum mendukung kelancaran pelaksanaan ujian praktik, yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan materi yang dapat diujikan. Uraian berikut menjelaskan efektivitas prasarana uji praktik di setiap Polda.

1) Polda Metro Jaya

Khusus di Satpas Daan Mogot, lapangan uji praktik yang tersedia cukup luas, digunakan untuk melaksanakan ujian praktik semua golongan SIM. Kondisi tersebut berbeda dengan di Satpas lainnya, yaitu lapangan uji praktik yang tersedia sempit, karena keterbatasan

lahan. Di Satpas Polresta Bekasi dan Polres Depok, lapangan uji praktik bahkan berhimpitan dengan tempat parkir kendaraan.

Akibat sempitnya lahan untuk ujian praktik maka tidak semua materi ujian praktik bisa diujikan. Beberapa tempat hanya mengujikan 4 materi, bahkan di Bekasi Kota hanya diujikan 2 materi. Kondisi tersebut tentu saja tidak efektif untuk mengetahui ketrampilan peserta uji.

Karena lahan untuk uji praktik sempit, maka sarana untuk uji tanjakan juga tidak tersedia, kecuali di Satpas Daan Mogot, Polresta Bekasi dan Polres Tangerang Kota; itupun tingkat kemiringan maupun tingginya di bawah standard, kecuali di Satpas Daan Mogot.

Prasarana lain yang terkait dengan ujian praktik adalah ruang tunggu untuk peserta yang akan mengikuti ujian. Hampir di semua Satpas, kecuali di Satpas Daan Mogot, ruang tunggu ujian praktik belum mendapatkan perhatian. Peserta ujian dibiarkan menunggu di tempat terbuka, tanpa disediakan tempat khusus untuk menunggu giliran. Hal itu tentu saja sangat tidak mendukung kenyamanan peserta ujian.

2) Polda Jawa Barat

Hampir di semua Satpas lapangan uji praktik yang tersedia masih di bawah standard, kecuali di Satpas Polres Bogor. Karena lahan untuk uji praktik sempit, maka prasarana untuk uji tanjakan juga tidak ada. Akibatnya tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan, termasuk ujian praktik II. Dengan demikian, lapangan uji praktik belum efektif mendukung kelancaran pelaksanaan ujian praktik.

Ruang tunggu untuk peserta ujian praktik juga tidak tersedia di hampir semua Satpas, kecuali di Polres Karawang. Di Satpas ini terdapat ruang tunggu untuk peserta ujian praktik, namun tidak

tersedia penyejuk udara. Dengan demikian secara umum ruang tunggu yang tersedia juga belum mendukung kenyamanan peserta ujian praktik.

3) Polda Jawa Tengah

Lapangan untuk ujian praktik yang tersedia di beberapa Satpas tergolong sempit, sehingga hanya dapat digunakan untuk ujian praktik R-2. Itu pun tidak semua materi dapat diujikan, sehingga kurang efektif dalam mendukung kelancaran ujian praktik.

Karena keterbatasan lahan maka ujian praktik untuk R-4 umumnya menggunakan lahan yang dipinjam dari instansi lain, umumnya milik Pemda. Oleh karena lahan untuk ujian praktik tersebut milik instansi lain, maka sarana uji tanjakan juga tidak dapat disediakan. Tentu saja hal itu kurang efektif, karena selain jarak dari ujian teori menuju ke tempat ujian praktik R-4 cukup jauh, juga tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan.

Di beberapa Satpas tidak tersedia ruang tunggu untuk ujian praktik, bahkan tidak tersedia tempat duduk bagi pemohon yang antri untuk mengikuti ujian praktik. Ruang tunggu ujian praktik hanya terdapat di Satpas Polres Klaten, Polres Surakarta, Polres Salatiga dan Polres Sragen. Dengan demikian belum efektif mendukung kenyamanan peserta ujian praktik.

4) Polda Bali

Hampir semua Satpas di Polda Bali belum menyediakan lahan yang memadai untuk ujian praktik, karena keterbatasan lahan yang dimiliki. Karena sempitnya lahan maka beberapa Satpas umumnya belum memiliki sarana uji tanjakan, dan hanya memanfaatkan jalan menanjak untuk uji praktik. Tentu saja hal itu kurang efektif karena tingkat kemiringan tidak sesuai dengan standard yang ditentukan dalam Perkap 09/2012.

Oleh karena lahan untuk uji praktik yang dimiliki setiap Satpas itu sempit, maka di semua Satpas tidak ada yang mengujikan materi ujian praktik secara lengkap, baik untuk uji praktik kendaraan R-2 maupun R-4. Di Polres Gianyar dan Klungkung, ujian praktik 1 untuk kendaraan R-4 bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

Beberapa Polres yang tidak menyelenggarakan ujian praktik secara lengkap dan yang sama sekali tidak melaksanakan ujian praktik 1 untuk kendaraan R-4 mengatakan bahwa selalu melaksanakan ujian praktik 2, yang pelaksanaannya dilakukan di jalan yang sepi. Meskipun demikian hal itu tentu saja tidak efektif karena tidak mencerminkan kemampuan mengemudi.

Di hampir semua Satpas tidak tersedia ruang tunggu untuk ujian praktik, bahkan tidak tersedia tempat duduk bagi pemohon yang antri untuk mengikuti ujian praktik, sehingga belum mendukung kenyamanan bagi peserta ujian praktik. Satu-satunya ruang tunggu yang tersedia untuk ujian praktik hanya terdapat di Satpas Polres Klungkung. Selain ruang tunggu berupa bangunan permanen, di Satpas ini juga disediakan tempat duduk bagi pengunjung.

5) Polda Sumatera Barat

Ruang tunggu ujian praktik pada umumnya belum mendukung kenyamanan pemohon SIM. Di ruang tunggu ujian praktik tidak tersedia bangku, sehingga peserta uji praktik harus menunggu sambil berdiri untuk dipanggil. Tampaknya kenyamanan ruang tunggu untuk ujian praktik belum menjadi perhatian dari setiap Satpas di Wilayah Polda Sumatera Barat.

Luas lapangan uji praktik pada umumnya juga di bawah standard. Karena lapangan yang sempit maka materi ujian praktik tidak dapat diujikan semua, termasuk uji tanjakan untuk R-4, karena tidak tersedia sarana untuk uji tanjakan. Bagi Satpas yang sudah memiliki

uji tanjakan, tingkat kemiringannya juga tidak sesuai dengan standard yang ditentukan dalam Perkap 09/2012. Tentu saja semua itu berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan uji praktik, karena tidak mencerminkan kemampuan pemohon SIM.

6) Polda Kepulauan Riau

Lapangan uji praktik di beberapa Satpas cukup luas, seperti di Polresta Bareleng dan Polres Karimun, sehingga efektif mendukung kelancaran pelaksanaan ujian praktik. Meskipun demikian di Satpas lainnya seperti Satpas Polres Tanjung Pinang dan Polres Bintan lapangan uji praktik belum efektif, karena menyatu dengan tempat parkir kendaraan.

Karena lapangan yang sempit maka hampir di semua Satpas tidak tersedia sarana uji tanjakan untuk R-4, walaupun uji tanjakan tetap dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan jalan menanjak. Meskipun demikian hal itu tentu saja kurang efektif karena tingkat kemiringannya tidak sesuai dengan standard yang telah ditentukan.

Ruang tunggu untuk ujian praktik di setiap Satpas umumnya belum menjadi perhatian, sehingga tidak mendukung kenyamanan pemohon SIM. Di Polresta Bareleng misalnya, ruang tunggu atau lebih tepat disebut tempat untuk menunggu hanya berupa tenda seluas 2 X 2 meter, tanpa dilengkapi kipas angin, sehingga sangat panas. Selain itu di ruang tunggu juga tidak tersedia kursi sehingga peserta uji praktik harus menunggu untuk dipanggil sambil berdiri.

7) Polda Jambi

Lapangan uji praktik di beberapa Satpas seperti di Polresta Jambi dan Polres Batanghari sangat tidak efektif untuk melaksanakan uji praktik, karena sempit dan menyatu dengan tempat parkir. Walaupun di Satpas lain seperti di Polres Batanghari dan Polres Merangin lapangan uji praktik yang tersedia cukup luas, namun

karena bukan milik sendiri (menggunakan lahan kosong milik KONI) maka tidak dapat dibuat tempat uji tanjakan, sehingga kurang efektif mendukung pelaksanaan ujian praktik. Begitu pula di Satpas Polresta Jambi, Polres Muaro Jambi, Polres Batanghari dan Polres Merangin yang lapangan ujinya sempit. Di Satpas-Satpas tersebut uji tanjakan memang dilaksanakan dengan memanfaatkan jalan menanjak, namun tetap tidak efektif karena tingkat kemiringannya tidak sesuai dengan standard yang telah ditentukan.

Hampir di semua Satpas tidak tersedia ruang tunggu untuk ujian praktik, sehingga pemohon SIM harus menunggu giliran dengan berdiri. Hal itu tentu saja tidak mendukung kenyamanan pemohon SIM. Ruang tunggu untuk ujian praktik hanya tersedia di Polresta Jambi, yaitu berupa bangunan permanen yang menyatu dengan layanan lainnya, dan disediakan kursi dari kayu sehingga peserta ujian tidak harus berdiri.

8) Polda Kalimantan Tengah

Lapangan uji praktik yang tersedia di hampir di semua Satpas luasnya di bawah standard, bahkan di beberapa Satpas tidak tersedia lapangan untuk uji praktik R-4. Tentu saja hal itu tidak efektif, karena tidak mendukung kelancaran pelaksanaan ujian praktik. Ruang tunggu untuk ujian praktik pada umumnya juga tidak tersedia, begitu pula bangku untuk duduk peserta ujian, sehingga tidak efektif mendukung kenyamanan peserta ujian.

9) Polda Sulawesi Tenggara

Hampir di semua Satpas tidak tersedia ruang tunggu dan tempat duduk untuk peserta ujian praktik, sehingga tidak efektif mendukung kenyamanan peserta ujian. Satu-satunya ruang tunggu yang tersedia untuk ujian praktik hanya terdapat di Polres Konawe Selatan yaitu berupa tenda kerucut yang memuat kurang lebih 15 orang.

Lapangan uji praktik yang tersedia pada umumnya sempit, sehingga tidak dapat dibuat sarana uji tanjakan. Hal itu tentu saja kurang efektif, karena tidak semua materi ujian praktik bisa diujikan. Uji praktik tanjakan memang dilakukan dengan memanfaatkan jalan yang menanjak, namun hal itu kurang efektif karena tingkat kemiringannya tidak sesuai dengan standard yang ditentukan dalam Perkap 09/2012.

6. Kompetensi Petugas Penguji SIM

Di dalam Pasal 17 Perkap Nomor 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi disebutkan bahwa petugas penguji SIM harus memiliki kompetensi, antara lain berupa kemampuan mengajar atau melatih, yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat lulus pendidikan dan latihan penguji SIM yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diangkat sebagai penguji dengan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri). Terkait dengan itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa masih banyak penguji di setiap Polda yang belum memiliki sertifikat penguji, karena keikutsertaan petugas dalam proses sertifikasi penguji didasarkan pada permintaan dari Korlantas, melalui Ditlantas Polda setempat. Oleh karena alokasi jumlah penguji yang dapat diikutsertakan terbatas, maka hanya beberapa penguji di Satpas Polres yang bisa diikutkan, itupun tidak bisa dari semua Polres. Uraian berikut menjelaskan kompetensi petugas penguji SIM di setiap Polda.

a. Polda Metro Jaya

Di Satpas-Satpas wilayah Polda Metro Jaya yang diteliti secara keseluruhan terdapat 180 petugas penguji SIM, terbanyak di Daan Mogot berjumlah 145 orang. Meskipun demikian jumlah petugas penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji baru 33 orang (18,3%). Rincian Jumlah penguji SIM dan jumlah penguji SIM yang bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Metro

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji SIM Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Daan Mogot	145	23	15,8
2	Polresta Bekasi	7	2	28,5
3	Polres Bekasi Kota	8	0	0
4	Polres Depok	5	4	80
5	Polres Tangerang Kota	15	4	26,6
	Jumlah	180	33	18,3

b. Polda Jawa Barat

Di Satpas-Satpas yang diteliti, jumlah petugas penguji SIM yang memiliki sertifikat penguji masih sedikit. Di setiap Satpas jumlah penguji yang sudah bersertifikat hanya sekitar 20%. Di Satpas Polres Karawang bahkan hanya terdapat 1 orang yang memiliki sertifikat penguji. Walaupun beberapa penguji belum bersertifikat, namun secara teknis mereka sudah memiliki ketrampilan untuk menjadi penguji.

Tabel 4.20.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Jawa Barat

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polrestabes Bandung	19	7	36,8
2	Polres Cimahi	25	7	28
3	Polres Purwakarta	14	3	21,4
4	Polres Subang	15	4	26,6
5	Polres Karawang	19	1	5,2
6	Polres Bogor Kota	17	6	35,2
7	Polres Bogor	30	3	10
	Jumlah	139	31	22,3

c. Polda Jawa Tengah

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 22 orang penguji yang bersertifikat, dari 160 penguji SIM (13,7%). Tabel berikut menjelaskan jumlah penguji SIM dan jumlah penguji yang sudah memiliki sertifikat penguji yang dikeluarkan oleh LSP.

Tabel 4.21.

Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Jawa Tengah

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polrestabes Semarang	39	5	12,8
2	Polres Kudus	15	3	20
3	Polres Demak	13	3	23
4	Polresta Semarang	12	2	16,6
5	Polres Salatiga	20	2	10
6	Polres Boyolali	10	1	10
7	Polres Klaten	12	3	25
8	Polres Sragen	14	2	14,2
9	Polres Surakarta	25	1	4
	Jumlah	160	22	13,7

d. Polda Bali

Di Satpas-Satpas di wilayah Polda Bali yang diteliti secara keseluruhan terdapat 80 orang petugas penguji SIM, namun yang sudah bersertifikat hanya 17 orang (21,2%). Tabel berikut menjelaskan jumlah penguji SIM dan jumlah penguji yang sudah memiliki sertifikat penguji yang dikeluarkan oleh LSP.

Tabel 4.22.

Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Bali

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polresta Denpasar	34	5	14,7
2	Polres Tabanan	4	3	75
3	Polres Badung	4	2	50
4	Polres Buleleng	15	2	13,3

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
5	Polres Bangli	8	2	25
6	Polres Gianyar	11	1	9
7	Polres Klungkung	4	2	50
	Jumlah	80	17	21,2

e. Polda Sumatera Barat

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 23 orang petugas penguji SIM, namun yang sudah memiliki sertifikat hanya 9 petugas. Rincian jumlah penguji SIM di setiap Satpas dan jumlah penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23.

Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Sumatera Barat

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polresta Padang	6	2	33,3
2	Polres Padang Panjang	3	1	33,3
3	Polres Tanah Datar	3	2	66,6
4	Polres Payakumbuh	6	2	33,3
5	Polres Bukit Tinggi	5	2	40
	Jumlah	23	9	39,2

f. Polda Kepulauan Riau

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 10 orang petugas penguji SIM, namun yang sudah memiliki sertifikat hanya 6 petugas. Rincian jumlah penguji SIM di setiap Satpas dan jumlah penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Kepulauan Riau

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polresta Barelang	3	-	0
2	Polres Tanjung Pinang	3	3	100
3	Polres Bintan	2	2	100
4	Polres Tanjung Balai Kasrimun	2	1	50
	Jumlah	10	6	60

g. Polda Jambi

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 31 orang petugas penguji SIM, namun yang sudah memiliki sertifikat hanya 6 orang. Rincian jumlah penguji SIM di setiap Satpas dan jumlah penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Kepulauan Jambi

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polresta Jambi	8	3	37,5
2	Polres Muaro Jambi	2	1	50
3	Polres Batanghari	7	3	42,8
4	Polres Bungo	6	2	25
5	Polres Merangin	8	2	25
	Jumlah	31	11	35,48

h. Polda Kalimantan Tengah

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 38 petugas penguji SIM, namun yang sudah memiliki sertifikat hanya 16 petugas. Tabel berikut menjelaskan jumlah penguji SIM dan jumlah penguji yang sudah memiliki sertifikat penguji yang dikeluarkan oleh LSP.

Tabel 4.26.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Kalimantan Tengah

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polres Palangkaraya	11	4	36,4
2	Polres Pulang Pisau	5	1	20
3	Polres Kapuas	3	2	66,6
4	Polres Katingan	5	3	60
5	Polres Kota Waringin Timur	8	3	37,5
6	Polres Kota Waringin Barat	6	3	50
	Jumlah	38	16	42

i. Polda Sulawesi Tenggara

Di Satpas-Satpas yang diteliti secara keseluruhan terdapat 18 orang petugas penguji SIM, dan yang sudah memiliki sertifikat ada 16 petugas. Rincian jumlah penguji SIM di setiap Satpas dan jumlah penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27.
Jumlah penguji SIM dan yang bersertifikat di Polda Sulawesi Tenggara

No	Tempat Uji SIM	Jumlah Penguji SIM	Penguji Bersertifikat	
			Jumlah	%
1	Polres Kendari	4	4	100
2	Polres Konawe	4	4	100
3	Polres Kolaka	3	3	100
4	Polres Bombana	4	2	50
5	Polres Konawe Selatan	3	3	100
	Jumlah	18	16	88,8

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1) Sarana Uji Teori

- a) Sarana uji teori di semua Satpas umumnya tergolong cukup lengkap, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. Meskipun demikian masih ada beberapa peralatan yang tidak ada di setiap Satpas, yaitu *headset*. Selain itu sarana uji teori berupa proyektor dan layar tidak terdapat di setiap Satpas.
- b) Sarana uji teori online juga tersedia cukup lengkap di setiap kewilayahan. Meskipun demikian di beberapa Polres belum didukung dengan jaringan yang cukup baik, sehingga sering menimbulkan kelambatan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian.

2) Sarana uji praktik

- a) Sarana uji praktik umumnya kurang lengkap. Kendaraan R-2 dan R-4 untuk ujian praktik tersedia, namun masih banyak yang hanya menggunakan transmisi manual.
- b) Kerucut lalu lintas di setiap Satpas masih banyak yang kurang dan belum ada yang menggunakan sensor.
- c) Banyak Satpas yang belum memiliki sarana uji tanjakan untuk R-4, sehingga uji tanjakan dilaksanakan di jalan.

- d) Simulator kendaraan R-2 dan R-4 di semua Satpas banyak yang tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ada anggaran untuk perawatan.
- e) Uji praktik SIM B1 dan B2 di hanya tersedia di beberapa tempat karena terkendala oleh kendaraan dan lahan uji prakteknya.

3) Prasarana Uji Teori

- a) Prasarana uji teori di semua Satpas tergolong lengkap, seperti ruang ujian teori dan ruang tunggu untuk ujian teori. Meskipun demikian tenda portabel tidak ada yang memiliki karena Polres jajaran umumnya tidak pernah melayani SIM di luar lingkungan Polres.
- b) Ruang untuk ujian teori dan ruang tunggu di semua Satpas umumnya cukup nyaman bagi pemohon SIM, yaitu dilengkapi dengan AC. Meskipun di beberapa Satpas ruang tunggu masih terbuka dan hanya dilengkapi dengan kipas angin.
- c) Khusus di Polda Bali, di beberapa Satpas terdapat studio Harkamtibmas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang keselamatan dan keamanan berlalulintas.

4) Prasarana uji praktik

- a) Secara umum, prasarana uji praktik kurang lengkap. Lapangan praktik R-2 dan R-4 umumnya kurang luas, karena keterbatasan lahan. Akibatnya tidak semua materi ujian praktik dapat diujikan. Ujian praktik 2 umumnya juga tidak dilaksanakan.
- b) Ruang tunggu ujian praktik umumnya masih belum memadai, dan berada pada ruang terbuka tanpa AC. Bahkan di beberapa

Satpas tidak disediakan ruang tunggu, bahkan tempat duduk untuk menunggu.

b. Efektivitas Sarana dan Prasarana

1) Efektivitas Sarana Uji Teori dan Uji Praktik

- a) Beberapa sarana uji teori maupun ujian praktik tergolong cukup efektif dikaitkan dengan tujuan diadakannya sarana tersebut. Dengan adanya sarana komputer untuk ujian teori maupun untuk kegiatan pendukung ujian SIM. Penggunaan komputer pada ujian teori meningkatkan kualitas ujian itu sendiri, transparan dan akuntabilitas. Meskipun demikian ujian teori yang harus menggunakan komputer secara *online* kurang efektif bagi peserta ujian yang tidak terbiasa menggunakan komputer.
- b) Jaringan komputer umumnya sudah baik, namun di beberapa Satpas jaringannya lambat dan kurang dukungan listrik, sehingga kurang efektif untuk mendukung terlaksananya ujian teori. Selain itu, server ujian SIM *online* yang ada di Korlantas kadang *down* karena lalu lintas data yang padat, sehingga mengganggu proses ujian SIM di Satpas yang menggunakan sistem yang secara *real time* dari Korlantas.
- c) Walaupun di beberapa Satpas terdapat proyektor, namun umumnya tidak digunakan dalam sosialisasi sebelum ujian karena petugas lebih suka memberikan penjelasan secara lisan. Hal itu karena jika penjelasan dilakukan dengan menggunakan proyektor membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan demikian keberadaan proyektor tidak efektif untuk memberikan sosialisasi pelayanan uji SIM.
- d) Kendaraan bermotor R-2 dan R-4 yang digunakan untuk ujian praktik cukup efektif, meskipun jumlahnya di beberapa Satpas belum memadai. Meskipun demikian, oleh karena kendaraan untuk ujian umumnya hanya menggunakan transmisi manual,

maka menjadi kurang efektif terutama bagi masyarakat yang hanya bisa menggunakan kendaraan dengan transmisi otomatis.

- e) Ujian peningkatan golongan SIM yang hanya menggunakan simulator kurang efektif, karena kurang bisa menunjukkan ketrampilan yang sesungguhnya dari pemohon SIM B1 dan B2. Begitu pula ujian simulator yang hanya menggunakan kendaraan jenis truck engkel.
- f) Walaupun di setiap Satpas tidak tersedia papan nilai digital untuk sarana uji praktik, namun cukup efektif mendukung pelaksanaan ujian praktik, karena hasilnya langsung dicetak menggunakan printer *barcode*.

2) Efektivitas Prasarana Uji Teori dan Uji Praktik

- a) Prasarana uji teori yang terdiri atas ruang ujian teori dan ruang tunggu umumnya efektif, walaupun tidak tersedia tenda *portable*. Keberadaan tenda *portable* umumnya tidak diperlukan karena Polres jajaran tidak pernah melayani SIM di luar lingkungan Polres.
- b) Keberadaan studio Harkamtibmas di beberapa Satpas di Polda Bali cukup efektif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
- c) Fasilitas ruang tunggu ujian praktik umumnya masih belum nyaman. Banyak Satpas yang tidak menyediakan ruang tunggu untuk peserta ujian praktik, bahkan di beberapa Satpas bahkan tidak disediakan tempat duduk untuk peserta yang menunggu ujian praktik.
- d) Lapangan uji praktik umumnya kurang luas dan banyak Satpas belum memiliki fasilitas tanjakan yang sesuai. Akibatnya tidak semua materi ujian dapat diujikan, sehingga hasil ujian kurang

mencerminkan ketrampilan yang sebenarnya dari pemohon SIM. Selain itu, karena keterbatasan lapangan uji praktik maka petugas juga harus sering membongkar pasang patok/*cone* uji disesuaikan dengan materi yang diujikan, sehingga tidak efektif. Selain bertambah merepotkan petugas, pelaksanaan ujian praktik juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

c. Kompetensi Petugas Penguji SIM

Petugas penguji SIM yang sudah memiliki sertifikat penguji jumlahnya masih sedikit, dan sebagian besar justru belum memilikinya, walaupun secara teknis mereka sudah memiliki ketrampilan untuk menjadi penguji.

2. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Efektivitas Sarana Uji Teori

- 1) Beberapa sarana uji teori perlu ditinjau kembali. *Headset* misalnya, harus ada untuk Satpas yang menggunakan ujian teori system AVIS, tapi tidak perlu ada untuk Satpas yang menggunakan ujian teori secara manual atau *online*. Oleh karena itu Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi perlu direvisi, dengan membedakan sarana uji teori untuk ujian secara manual, ujian secara *online*, dan ujian yang menggunakan sistem AVIS.
- 2) Penempatan layar atau proyektor di ruang ujian teori perlu dievaluasi, karena lebih cocok ditempatkan di ruang tunggu, yaitu untuk memutar film tentang keamanan dan ketertiban belalu lintas. Adapun penjelasan di ruang ujian teori cukup dilakukan secara lisan, karena lebih efektif.
- 3) Walaupun di beberapa Satpas sudah terdapat sarana komputer untuk ujian teori secara *online*, namun peserta uji teori sebaiknya diberikan pilihan untuk mengikuti ujian teori secara *online* atau

secara manual. Hal itu karena tidak semua peserta terbiasa menggunakan komputer.

- 4) Identitas orang lain yang kadang muncul dalam pendaftaran ujian teori secara *online* karena NIK dalam akses data E-KTP yang kurang akurat, maka perlu koordinasi dan verifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab secara nasional dalam penerbitan E-KTP, terkait dengan validasi dan akurasi data kependudukan. Adapun untuk mengatasi kelambatan data akibat jaringan, perlu ditingkatkan *bandwidth* jaringan.
- 5) Agar pelaksanaan ujian *online* tidak terganggu dengan server di Korlantas yang mengalami *down* karena padatnya lalu lintas data, maka server untuk ujian *online* sebaiknya tidak hanya terhubung dengan Korlantas, tapi juga *dibackup* dengan server lokal di setiap Satpas.
- 6) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta untuk mengurangi terjadi penyimpangan, maka pembayaran pembuatan SIM tidak harus dilakukan secara langsung di loket bank yang disiapkan Satpas, tapi bisa memanfaatkan sistem *M-Banking*, *I-Banking*, *SMS- Banking* atau ATM.
- 7) Untuk meningkatkan pelayanan, maka pendaftaran permohonan SIM sebaiknya bisa dilakukan secara *online*, atau menggunakan media sosial seperti WA dan SMS. Untuk memudahkan antrian saat menunggu ujian maka sistem antrian menggunakan nomor urut sebaiknya digantikan dengan sistem antrian FIFO (*first in first out*).

b. Peningkatan Efektivitas Sarana Uji Praktik

- 1) Kendaraan R-2 dan R-4 untuk ujian praktik perlu dilengkapi dengan kendaraan bertransmisi otomatis, karena banyak peserta ujian praktik yang hanya bisa mengendarai kendaraan bertransmisi otomatis.

- 2) Jumlah kerucut lalu lintas di setiap Satpas perlu dilengkapi, baik dengan cara pengadaan sendiri atau minta bantuan ke Dinas Perhubungan setempat. Terkait dengan kerucut lalu lintas ini, perlu dievaluasi apakah memang harus menggunakan sensor. Jika itu suatu keharusan, maka harus dilengkapi. Namun jika tidak, maka ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi perlu direvisi.
- 3) Bagi Satpas yang masih menggunakan patok kayu, maka jumlahnya perlu dilengkapi supaya petugas tidak dibuat repot dengan membongkar pasang patok yang ada.
- 4) Agar ujian praktik dapat dilaksanakan sesuai standar, maka sarana uji tanjakan sesuai dengan tingkat kemiringan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi harus disediakan di setiap Satpas, dan tidak cukup hanya menggunakan jalan yang menanjak.
- 5) Uji praktik peningkatan golongan SIM supaya menggunakan kendaraan sesuai dengan golongan SIM yang dibutuhkan. Namun jika tidak memungkinkan, uji praktik peningkatan golongan SIM bisa dilakukan dengan menggunakan simulator. Untuk itu maka penempatan simulator R-4 yang digunakan untuk ujian peningkatan golongan SIM supaya dibuat rayonisasi, sehingga dapat mendekati pada lokasi pemohon SIM.
- 6) Secara keseluruhan perlu modernisasi sarana yang ada sesuai dengan visi Kapolri yaitu profesional modern terpercaya (PROMOTER). Untuk itu maka semua sistem mulai dari pendaftaran sampai pencetakan SIM supaya terintegrasi, sehingga peningkatan pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat dapat dilakukan. Adapun pemanfaatan *Data Recovery Center* (DRC) Korlantas Polri perlu bekerjasama dengan Divisi Teknologi Informasi (DIV TI) Polri.

- 7) Pelaksanaan uji praktik R-4 untuk peningkatan golongan SIM B1 dan B2, sebaiknya bekerjasama dengan sekolah pengemudi yang sudah memiliki lisensi dan dalam pengawasan Polri.
- c. Peningkatan Efektivitas Prasarana Uji Teori
- 1) Ketentuan tentang tenda portabel yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi perlu ditekankan hanya untuk Satpas yang melayani SIM di luar lingkungan Polres.
 - 2) Untuk meningkatkan kenyamanan peserta ujian, ruang ujian teori dan ruang tunggu ujian teori di setiap Satpas supaya dilengkapi AC, atau paling tidak menggunakan kipas angin. Selain itu di ruang tunggu supaya disediakan kursi yang permanen.
 - 3) Sistem antrian di ruang tunggu ujian teori sebaiknya menggunakan sistem FIFO, terutama di Satpas yang banyak jumlah pemohon SIM, sehingga peserta ujian bisa memperkirakan berapa lama lagi harus menunggu.
 - 4) Studio Harkamtibmas yang ada di beberapa Satpas di Polda Bali dapat dijadikan model untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Studio yang sudah ada perlu lebih diefektifkan dengan mengundang siswa-siswa sekolah maupun kelompok-kelompok sosial lainnya untuk menyaksikan film yang diputar agar mereka mendapatkan pencerahan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
- d. Peningkatan Efektivitas Prasarana Uji Praktik
- 1) Lapangan uji praktik harus disesuaikan dengan standar dalam Peraturan Kapolri, atau paling tidak mendekatinya. Untuk itu setiap Satuan Kewilayahan perlu bekerja sama dengan Pemda setempat agar dapat disediakan lahan untuk uji praktik.

- 2) Untuk mengatasi materi ujian yang tidak dapat diujikan dalam ujian praktik, karena keterbatasan lahan uji praktik, maka dalam jangka pendek perlu dibuatkan standar minimum tentang jumlah dan jenis materi yang harus diujikan pada pemohon SIM, supaya ada keseragaman antar Satpas.
- 3) Ruang tunggu untuk uji praktik beserta tempat duduknya harus disediakan di setiap Satpas. Atau jika tidak dimungkinkan, di setiap Satpas harus disediakan tenda lengkap dengan tempat duduk yang disediakan untuk peserta ujian. Selain itu, di setiap ruang tunggu harus dilengkapi dengan penyejuk udara, paling tidak berupa kipas angin.
- 4) Untuk melayani pembuatan SIM bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Polres seperti di kepulauan, pelaksanaan ujian SIM baik teori maupun praktik sebaiknya tidak hanya dilakukan di Polres, tetapi juga diselenggarakan di luar Polres, di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 5) Prasarana fisik (gedung) Satpas seharusnya seragam. Untuk itu setiap pembangunan gedung Satpas yang baru perlu diseragamkan, dengan desain khusus untuk ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang uji teori, ruang uji praktik dan ruang cetak SIM.

e. Kompetensi Personel

Jumlah petugas penguji SIM yang bersertikat penguji supaya ditingkatkan, dengan cara lebih banyak mengikutkan petugas penguji dalam pendidikan sertifikasi penguji. Petugas yang sudah memiliki sertifikat penguji agar tidak ditempatkan di fungsi lain, kecuali untuk keperluan promosi.

PENUTUP

Demikian laporan hasil penelitian tentang "Efektivitas Sarana Prasarana Uji SIM Kendaraan Bermotor Guna Mewujudkan Pelayanan Prima" yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Polda dan Polres jajaran. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya, terkait dengan sarana prasarana uji SIM.

Jakarta, Desember 2016

**KABIDRIKWASTU PUSLITBANG POLRI
SELAKU KETUA PELAKSANA**

Drs. MOCH. SON ANI, SH.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62040942

DAFTAR SUSUNAN TIM PENELITI :

1. KBP KASIHANA ABDUL SHOLEH, SH.
2. AKBP RAHMAT SYUKRI.
3. AKBP SUCIPTA SH, MH.
4. AKBP AA. PUTRI SUCIPTAWATI, SH.
5. AKBP IDA AYU RUPINI, SH.
6. AKBP Drs. SUBAGIO (KORLANTAS POLRI).
7. Drs. MASYHURI IMRON, MA (Konsultan dari LIPI).
8. Dr. DANA INDRA SENSUSE (Konsultan dari UI).
9. IPDA WHISNU ARGO BINTORO, ST.
10. PENATA I ABDUL AZIZ, SH.
11. PENATA MULYANTO, SE.
12. PENDA SRI SUPARMI.